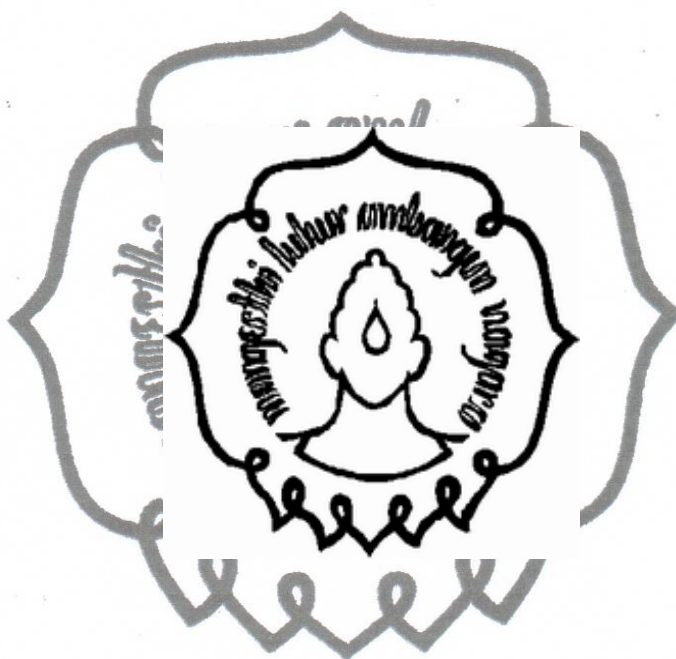


**STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN
DI SUBOSUKAWONOSRATEN TAHUN 2004 - 2008**



SKRIPSI

Oleh:

Widyastika Amalia

K7406033

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

commit to user

**STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN
DI SUBOSUKAWONOSRATEN TAHUN 2004 - 2008**



Skripsi

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan
Gelara Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

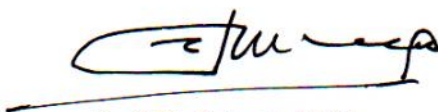
commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. Sutarno, M.Pd
NIP. 194807 13 1973 04.1.001

Pembimbing II



Leny Noviani, S.Pd, M.Si
NIP. 197903 11 2005 01.2.001

commit to user

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan telah diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari : Rabu

Tanggal : 2 Februari 2011

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda tangan

Ketua : Sudarno, S.Pd, M.Pd

Sekretaris : Dra. Sri Wahyuni, M.M

Anggota I : Prof. Dr. Soetarno, M.Pd

Anggota II : Leny Noviani, S.Pd, M.Si

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. M. Furqon H, M.Pd

NIP. 1960 0727 1987 02.1.001

ABSTRAK

Widyastika Amalia. **STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN DI SUBOSUKAWONOSRATEN TAHUN 2004-2008**. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2011.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) struktur pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten (2) cara mengembangkan sektor ekonomi unggulan yang potensial sebagai penggerak perekonomian antar Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten tahun 2004-2008.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder *pooling* di Subosukawonosraten yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah). Data tersebut adalah laju pertumbuhan, PDRB perkapita, dan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 di Subosukawonosraten. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Tipologi Klassen dan *Location Quotient*.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan: (1) terdapat pengelompokan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Subosukawonosraten, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar), daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Sukoharjo), daerah berkembang cepat (Kabupaten Sragen), dan daerah tertinggal (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten). (2) Kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah daerah di Subosukawonosraten, pada umumnya sudah sesuai dengan teknik perencanaan pembangunan daerah (yang mencakup aspek pemasaran, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, teknologi, dan modal), meskipun ada beberapa sektor unggulan yang belum mendapat perhatian khusus dalam penanganannya.

ABSTRAK

Widyastika Amalia. **THE STRUCTURE OF ECONOMIC GROWTH AND THE MAIN SECTORS IN SUBOSUKAWONOSRATEN IN THE YEAR 2004-2008**. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, January 2011.

The purpose of this study are to know (1) the structure of economic growth in Subosukawonosraten, (2) how to develop a potential leading economic sectors as economic drivers between district and municipalities in Subosukawonosraten in the year 2004-2008.

The researcher uses descriptive quantitative research methods. The data used are secondary data pooling in Subosukawonosraten, which is obtained from Central Bureau of Statistics (CBS) of Central Java Province. The data are: growth rate of gross regional domestic product, per capita gross regional domestic product, and gross regional domestic product by industrial origin at constant 2000 market price. The researcher used documentation technique to collect the data. She used Klassen Typology and Location Quotient to analysis the data.

Based on the result of the research, it can be concluded that (1) there are some economic growth clustering in Subosukawonosraten district, namely high growth and high income (Surakarta City and Karanganyar Regency), high income but low growth (Sukoharjo Regency), high growth but low income (Sragen Regency), and low growth and low income (Wonogiri, Boyolali, and Klaten Regency). (2) In general the policy that is being formulated in Subosukawonosraten is in conformity with the regional development planning technique (which includes marketing aspects, human resources, natural resources, technology, and capital), although there are some excellent sectors that has not received special attention yet.

MOTTO

Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.

Martin Luther King

Elemen terpenting kita bukan pada otak. namun, pada apa yang menuntun otak kita kepada kepribadian, hati, kebaikan, dan ide-ide progresif.

Fyodor Dostovevky

Tidak ada yang salah dengan menjadi seseorang yang ambisius, karena ini bisa dijadikan batu loncatan agar kau tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan hidupmu, meskipun gagal dikemudian hari kau tidak akan menyesalinya karena kau sudah berusaha sampai titik dimana tidak bisa untuk maju lagi.

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW,
aku berusaha untuk bisa mencintai-Mu melebihi apapun karena kasih yang kau berikan pada manusia sepertiku.

Ibuku, tak ada kata yang bisa melukiskan secara tepat rasa sayang dan terima kasihku pada wanita sepertimu yang entah dari mana tekad itu berasal, agar tak menjadikanku manusia yang sia-sia. Love you from the core of my heart.

Ayah (almarhum), tidak melihatku tumbuh dewasa bukan berarti aku melupakan harapan terbesarmu untuk membuatku seperti ibu, wanita yang kau cintai.

Ayah keduaku, terimakasih untuk hadir diwaktu yang tepat dalam kehidupan kami, menjaga ibu, serta mendukungku sampai detik ini.

Big brother, kadang menyebalkan tapi aku tau kau peduli padaku lebih dari apa yang kuharapkan.

Nenekku tersayang, aku sangat merindukan obrolan kecil kita tentang kakek, dalam beberapa hal kalian benar-benar menjadi inspirasiku.

Teman-temanku PTN 2006, terimakasih dengan memberiku kesempatan untuk mengenal kalian.

Almamaterku, lebih dari sekedar kata bangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang turut memperlancar penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui atas permohonan ijin penulisan skripsi ini.
4. Ketua BKK Pendidikan Tata Niaga Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Trisno Martono selaku Pembimbing Akademis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan kuliah selama ini.
6. Prof. Dr. Sutarno, M.Pd selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Leny Noviani, S.Pd, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga pada FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

commit to user

9. Ketua Bappeda di Subosukawonosraten yang telah memberikan ijin guna memperoleh data yang penulis perlukan, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penelitian penulis.
10. Teman-teman PTN 2006: Iit, Agtia, Annisa, Aulia, Laras, Nita, Septi dan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan tulus yang kalian berikan, masa-masa kuliah menjadi sangat menyenangkan bersama kalian.
11. Teman-teman Bluhoz: Ayunda, Arinda, Dani, Irda, Meilita, Dewi, Fajar, Uty, Nita akan sangat membosankan hidup di kota asing ini tanpa keceriaan yang kalian suguhkan meskipun tanpa kalian sadari, ini teramat berarti bagiku.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran membangun guna dapat memperbaiki penulisan yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Surakarta, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Konsep Pembangunan	7
2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	9
3. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	10
4. Pengembangan Sektor Unggulan	15
5. Sektor Unggulan dalam Pengembangan Wilayah	17
6. Teori Basis Ekonomi	19
7. Struktur Pertumbuhan Ekonomi	21
8. BKAD Subosukawonosraten	23
B. Hasil Penelitian yang Relevan	26
C. Kerangka Berpikir	28

commit to user

D. Hipotesis	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	32
B. Populasi	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Rancangan Penelitian	36
E. Teknik Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	42
B. Pengujian Hipotesis	50
1. Struktur Pertumbuhan Ekonomi	50
2. Upaya Meningkatkan Sektor Unggulan	52
C. Pembahasan Hasil Analisis Data	56
V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Simpulan	90
B. Implikasi	91
C. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008	4
2. Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen .	23
3. Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen .	39
4. Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008	42
5. PDRB Perkapita Masing-Masing Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008	43
6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Surakarta Tahun 2004-2008	44
7. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Boyolali Tahun 2004-2008	45
8. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Sukoharjo Tahun 2004-2008	45
9. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Karanganyar Tahun 2004-2008	46
10. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Wonogiri Tahun 2004-2008	47
11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Sragen Tahun 2004-2008	47
12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Klaten Tahun 2004-2008	48
13. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2004-2008	49
14. Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen	50
15. Struktur Pertumbuhan Ekonomi Menurut <i>Klassen Typology</i>	51
16. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Kota Surakarta	53
17. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Kabupaten Boyolali	54
18. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Kabupaten Sukoharjo	54

commit to user

19. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Kabupaten Karanganyar	54
20. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Kabupaten Wonogiri	55
21. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Kabupaten Sragen	55
22. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Kabupaten Klaten	55



DAFTAR GAMBAR

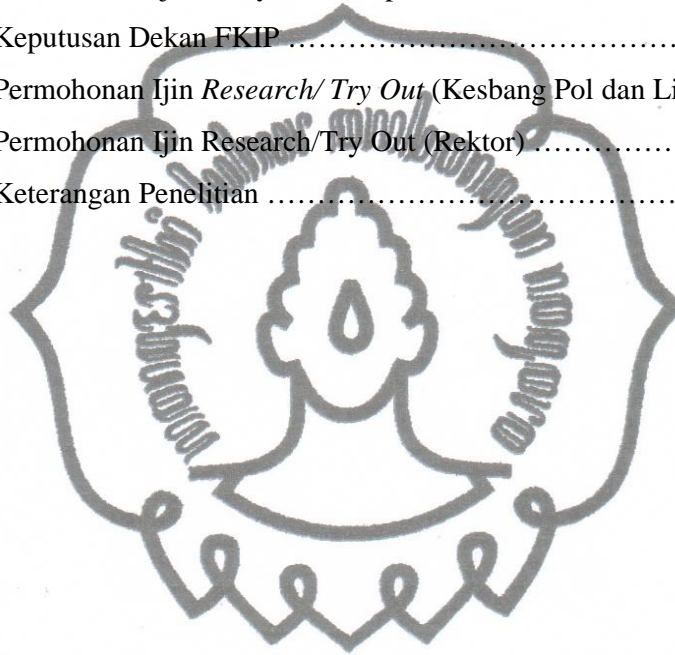
Gambar	
1. Kerangka Berpikir	29
2. Peta Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten Menurut Tipologi Klassen Tahun 2004-2008	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Jadwal Pelaksanaan dan Penyusunan Skripsi	101
2. Hasil Perhitungan Analisis <i>Location Quotient</i>	102
3. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi	137
4. Surat Keputusan Dekan FKIP	138
5. Surat Permohonan Ijin <i>Research/ Try Out</i> (Kesbang Pol dan Linmas) ...	139
6. Surat Permohonan Ijin <i>Research/ Try Out</i> (Rektor)	140
7. Surat Keterangan Penelitian	141



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi, yang berarti pembangunan tidak akan berhenti pada suatu titik tertentu saja, melainkan akan dilakukan terus-menerus yang bersifat menambah dan juga memperbaiki segala sesuatu menjadi serba lebih baik lagi. Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Namun, tidak mudah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pendapatan yang memadai secara bersamaan.

Ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan hal yang umum terjadi pada setiap proses pembangunan. Penyebabnya adalah adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta perbedaan alokasi dana pembangunan antarwilayah (Sjafrizal, 2008: 117-120). Akibat dari perbedaan tersebut, membuat kemampuan daerah dalam membangun wilayahnya juga berbeda, sehingga akan tercipta daerah maju dan daerah terbelakang. Ujung dari semakin besarnya ketimpangan yang terjadi antarwilayah, sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap wilayah.

Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, biasanya hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa secara fisik, yang diukur antara lain melalui Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah, baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama ini masih menganut pandangan tersebut. Pembangunan daerah akan berdampak pada pembangunan nasional, begitu pula sebaliknya. Hal ini berarti, saat suatu negara berhasil
commit to user

membangun daerahnya, maka secara tidak langsung negara akan memperoleh pendapatan dari kegiatan ekonomi daerah-daerah tersebut. Di samping itu, setiap kebijakan pembangunan nasional yang diambil harus berdasarkan kepentingan nasional yang diselaraskan dengan kepentingan daerahnya, karena dampaknya tidak hanya akan berpengaruh pada struktur ekonomi nasional saja melainkan juga berpengaruh pada struktur ekonomi daerahnya. Namun, untuk mengembangkan perekonomian daerah bukan hal yang mudah. Mengingat sistem perekonomian kita dulu bersifat sentralisasi yang membuat daerah selalu tergantung pada bantuan pemerintah pusat, untuk itu sistem ini akhirnya dirubah agar daerah mampu tumbuh dan berkembang dengan kemampuannya sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Irawan dan Suparmoko (2002: 260) yang menyatakan bahwa: “*Indegenous forces* (kekuatan dari dalam) untuk berkembang”. Daerah dituntut mampu mengelola segala potensi yang ada sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat, sedangkan bantuan dari pemerintah pusat hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

“Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) wilayah tersebut” (Lincoln Arsyad, 2009: 109). Pembangunan daerah semestinya disesuaikan dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang kurang sesuai dengan potensi ekonomi di daerahnya, menjadikan pemanfaatan sumberdaya yang ada menjadi kurang maksimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Langkah strategis pembangunan yang diambil pemerintah harus berlandaskan dalam upaya mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja secara optimal, sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan pembangunan yang diambil, harus mempertimbangkan kondisi, permasalahan dan potensi ekonomi

yang dimiliki oleh suatu wilayah, sehingga diperlukan penerapan kebijakan pembangunan pada tiap-tiap wilayah.

Pembangunan ekonomi regional sekarang berada dalam aturan otonomi daerah, yang berarti pemerintah daerah diberi kewenangan, hak serta kewajiban untuk mengelola sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk bisa memanfaatkan segala potensi ekonomi secara optimal. Sjafrizal (2008: 245) berpendapat bahwa pembangunan daerah akan lebih ditekankan dengan memanfaatkan potensi dan karakteristik daerahnya, serta pemecahan masalah-masalah nasional utama yang lebih mendesak.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Beberapa daerah akan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cepat, sementara beberapa daerah lain pertumbuhan ekonominya lambat, yang berarti terjadi perbedaan pada tingkat kemakmuran. Daerah-daerah tersebut mengalami kemajuan ekonomi yang tidak sama dikarenakan perbedaan karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah. Hal tersebut tergantung pada kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa serta upaya dalam pendekatan pembangunan yang dilakukan. Berdasarkan alasan inilah, perlu dikembangkannya sektor basis karena dianggap sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, dan setiap perubahan pada sektor basis akan menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) pada perekonomian regional.

Menurut Lincolin Arsyad (2009: 116) mengatakan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan adalah berkaitan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pembangunan akan lebih difokuskan pada sektor-sektor unggulan yaitu pada industri-industri berorientasi ekspor yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penyerapan tenaga kerja, termasuk di daerah-daerah Subosukawonosraten.

Subosukawonosraten merupakan eks Karesidenan Surakarta yang wilayahnya meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,

Sragen dan Klaten. Daerah-daerah tersebut tergabung dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Daerah), yang terbentuk pada tanggal 30 Oktober 2006 sebagai salah satu tindak lanjut diberlakukannya otonomi daerah. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah harus berkompetisi agar tetap bertahan mengandalkan potensi yang dimilikinya, yang meliputi potensi sejarah, seni, budaya, perdagangan, industri dan lain sebagainya yang saling berkaitan antar daerah, sehingga mereka mengadakan kerjasama dengan tujuan demi terciptanya sebuah kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, mengingat adanya keterbatasan potensi ekonomi yang dimiliki daerah.

Usaha pembangunan terus dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu tantangan karena jika dilihat dari indikator makro yang dimiliki Subosukawonosraten belum menunjukkan hasil yang optimal. Indikator yang umum dijadikan acuan untuk melihat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah dari PDRB, PDRB perkapita serta laju pertumbuhan masing-masing wilayah.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Surakarta	5,80	5,15	5,43	5,82	5,69
2.	Boyolali	3,42	4,08	4,20	4,08	4,04
3.	Sukoharjo	4,33	4,11	4,53	5,11	4,84
4.	Karanganyar	5,98	5,49	5,08	5,74	5,75
5.	Wonogiri	4,10	4,31	4,07	5,07	4,27
6.	Sragen	4,93	5,16	5,18	5,73	5,69
7.	Klaten	4,86	4,59	2,30	3,31	3,93

Sumber. BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1 memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan perekonomian tiap Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun sebelumnya. Apabila dilihat secara keseluruhan, perekonomian di Subosukawonosraten ditahun 2008 menunjukkan pertumbuhan meskipun sedikit melambat akibat pengaruh krisis global. Kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan tetap stabil di tahun

2008 hanya di Kabupaten Karanganyar dan Klaten, sedangkan lima kabupaten lain mengalami pertumbuhan yang menurun.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten, dapat dilakukan melalui suatu kebijakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan yang akan dijadikan orientasi masing-masing wilayah untuk dikembangkan sebagai roda penggerak perekonomian Subosukawonosraten. Hal inilah yang menjadi pokok masalah, yang kemudian diidentifikasi sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun agenda dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Melihat latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana struktur pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten?
- b. Bagaimana mengembangkan sektor ekonomi unggulan yang potensial sebagai penggerak perekonomian antar Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan dapat tercapai dengan melakukan suatu tindakan tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Mengetahui struktur pertumbuhan ekonomi di Subosukowonosraten.
- b. Mengetahui cara mengembangkan sektor ekonomi unggulan yang potensial sebagai penggerak perekonomian antar Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan, pertimbangan, dan pengembangan pada penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Masukan bagi para pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah di Subosukawonosraten dalam rangka mempersiapkan program pembangunan selanjutnya serta terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang bisa digunakan perguruan tinggi khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk mengembangkan pendidikan dan ilmu terapan di dunia kerja.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan perubahan positif, yang dimulai dari proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri sampai pada menikmati hasil-hasilnya. Kegiatan ini berupa pengelolaan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, sehingga pelaksanaan produksi bisa lebih efektif dan efisien. Hasil pembangunan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk serta pendapatan nasional.

Tujuan utama pembangunan adalah guna mencapai kualitas hidup yang serba lebih baik, sesuai dengan tercapainya apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan. Melihat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, pada masa sekarang ini orientasi pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saja, tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan masyarakat bidang sosial, seperti sikap, perilaku, kelembagaan maupun teknologi. Apapun komponennya dari kehidupan yang lebih baik tersebut, pembangunan untuk masyarakat harus mempunyai tiga sasaran (Todaro dan Smith, 2006: 22) yaitu:

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas jangkauan distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Meningkatkan tarah hidup yaitu selain meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang jika dilihat secara keseluruhan bukan hanya memperbaiki kesejahteraan material tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri baik sebagai individu maupun bangsa.
- c. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan cara membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam lingkup antar orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia.

Pembangunan dilakukan disetiap bidang, termasuk pada bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat dilihat dari pendapatan perkapitanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Irawan dan Suparmoko (2002: 5) "Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita".

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan, baik bagi daerah maupun negara. Pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ini akan berbeda di tiap-tiap daerah tergantung pada kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi wilayah menjadi penyebab utama perbedaan tersebut, dimana perbedaan ini menciptakan wilayah maju dan wilayah tertinggal. Kenyataannya, investor cenderung menanamkan modalnya pada wilayah yang sudah maju karena dianggap mempunyai keuntungan yang menjanjikan. Akibatnya, wilayah yang tertinggal akan semakin sulit untuk bersaing dengan wilayah yang sudah maju serta semakin lambat pertumbuhannya ekonomi di wilayah terbelakang.

Campur tangan pemerintah akan sangat menentukan kelangsungan hidup daerah-daerah tertinggal untuk bertahan. Penentuan sektor prima yang akan diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi menjadikan pelaksanaan kebijakan akan lebih terfokus dan terarah. Sektor-sektor tersebut akan dijadikan sebagai penggerak perekonomian pada setiap wilayah dan sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sangat berperan dalam kegiatan perekonomian suatu daerah, misalnya pembangunan jalan dan jembatan dalam upaya melancarkan arus barang dan jasa sektor unggulan dari satu daerah ke daerah lain, sehingga perekonomian yang kuat dan mandiri akan tercipta bukan hanya pada daerah yang bersangkutan tapi juga secara nasional.

2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Budiono (1999: 2) menyatakan bahwa “Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan”. Jadi, presentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut semakin meningkat. Pendapat lain dikemukakan oleh Simon Kuznets dalam Jhingan (2007: 57) mendefinisikan “Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemampuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya”.

Faktor utama pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat (Todaro, 1994: 116) adalah:

a. Akumulasi modal

Akumulasi modal meliputi semua investasi baru pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pada dasarnya, akumulasi modal akan menambah sumber daya baru (contohnya, pembukaan tanah-tanah yang semula tidak digunakan) atau meningkatkan sumberdaya (misalnya irigasi, pupuk, pestisida), namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan pertukaran antara konsumsi sekarang dengan konsumsi di kemudian hari, yang berarti harus mengurangi konsumsi hari ini untuk dikonsumsi di kemudian hari.

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, secara tradisional, dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah tenaga produktif, sedangkan jumlah penduduk yang besar dapat digunakan sebagai pasar untuk menawarkan produk. Namun, perlu dilihat lagi, bahwa hal tersebut tergantung pada sistem

perekonomian untuk bisa menyerap tenaga kerja, sedangkan kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor penunjang, seperti kualitas individunya dalam hal manajerial dan administrasi.

c. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara penyelesaian tugas yang masih tradisional. Ada tiga klasifikasi dasar kemajuan teknologi, yaitu teknologi yang netral, yang hemat pekerja, dan yang hemat modal. Kemajuan teknologi yang netral terjadi jika penggunaan teknologi berhasil mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama, sedangkan kemajuan teknologi hemat modal atau hemat pekerja jika output yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menggunakan jumlah input pekerja dan modal yang sama.

3. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan daripada pembangunan nasional yang dapat dilihat melalui pelaksanaan otonomi daerah dan sumberdaya nasional yang diarahkan guna memberikan kesempatan pada daerah dalam mengelola semua potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal, penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan pelayanan pada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Lincoln Arsyad (2009: 108) menyatakan bahwa yang menjadi persoalan utama dalam pembangunan difokuskan pada penetapan kebijakan pembangunan yang telah disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah dengan mengerahkan segala sumberdaya secara maksimal. Pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu menggali dan mengenali potensi sumberdaya guna merancang dan melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Peran serta antara swasta dan pemerintah diperlukan untuk menjalin suatu mitra kerjasama dalam usahanya untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi. Tidak

hanya itu, keinginan dari dalam diri masyarakat untuk berkembang merupakan motivasi paling utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Robinson Tarigan (2009: 46) berpendapat bahwa "Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi". Pengembangan metode-metode untuk menganalisis perekonomian daerah sangat penting guna memperoleh data tentang perekonomian suatu daerah serta bagaimana proses pertumbuhannya, sehingga hal ini bisa digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa saja yang tepat guna melakukan pembangunan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan (Lincoln Arsyad, 2009: 114).

Lincoln Arsyad (2009: 114) menyatakan bahwa menganalisis perekonomian suatu daerah tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan:

- a. Data yang tersedia tentang daerah masih sangat terbatas
- b. Data yang tersedia pada umumnya tidak sesuai dengan yang diperlukan untuk menganalisis perekonomian suatu daerah, karena data tersebut tersedia guna memenuhi kebutuhan analisis perekonomian nasional.
- c. Data tentang perekonomian daerah sangat sulit untuk dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional.
- d. Bagi negara sedang berkembang, di samping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang ada terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

Menganalisis perekonomian daerah diperlukan sebagai dasar oleh pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan yang matang guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Tidak sedikit kendala yang harus dihadapi, namun bukan berarti pemerintah daerah menyerah pada keadaan dengan tidak melakukan perbaikan. Berbagai metode maupun pendekatan menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menganalisis pembangunan ekonomi

daerah yang sesuai dengan keadaan daerah, baik dari segi sumberdaya yang ada maupun struktur perekonomiannya.

Dalam uraian berikut akan dikemukakan beberapa teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ekonomi Neo Klasik menganggap perekonomian akan mencapai keseimbangan alaminya jika kegiatan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar. Menurut Lincolin Arsyad (2009: 115):

Teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Dengan demikian, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

Namun, bukan berarti tidak diperlukan campur tangan pemerintah dalam prosesnya. Kebijakan pemerintah dibuat untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses produksi, pemasaran, tenaga kerja, modal dan teknologi. Implementasinya dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, keamanan dan kestabilan politik. Peningkatan kualitas manusianya dapat dilihat dari tingkat kemajuan teknologi yang dihasilkan. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

b. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pentingnya suatu basis ekonomi bagi daerah untuk bisa mengembangkan perekonomiannya. Sektor basis merupakan semua kegiatan yang mampu menyediakan barang dan jasa ke luar daerah maupun ke luar negeri (ekspor). Ekspor dianggap sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang mampu mengeksport akan memperoleh tambahan pendapatan yang bisa digunakan untuk melakukan pembangunan. Rahardjo Adisasmita (2008: 45) berpendapat "Menurut teori basis ekspor, suatu wilayah bertumbuh atau berkembang sebagai akibat dari spesialisasi dalam kegiatan ekspor, dengan

ekspor akan diperoleh pendapatan, hal ini dapat meningkatkan kekayaan dan kemampuan suatu wilayah untuk melaksanakan pembangunan dan membayar harga barang-barang yang diimpornya dari wilayah luar”.

Lincoln Arsyad (2009: 116) berpendapat:

Kelemahannya adalah didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal yang menyebabkan ketergantungan terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun, model ini berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

Teori ini sangat bergantung pada besarnya ekspor suatu daerah. Namun, hal ini tidak menjadi sesuatu yang dianggap merugikan karena dampak dari berkembangnya basis ekonomi menjadikan sektor-sektor non basis ikut terpacu pertumbuhannya yang menjadikan aliran modal dalam wilayah akan terus mengalir sehingga akan menstabilkan perekonomian.

c. Teori Lokasi

”Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial” (Robinson Tarigan, 2009: 122). Teori ini menganggap lokasi berperan penting dalam setiap kegiatan pembangunan daerah. Mempertimbangkan lokasi yang tepat agar setiap kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara produktif dan efisien baik dalam bidang produksi maupun pemasarannya. Sjafrizal (2008: 19) berpendapat bahwa ”Teori lokasi tersebut menjadi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik akan dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk ongkos angkut sehingga ikut mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran”. Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan lokasi, yaitu biaya transportasi yang rendah, tenaga kerja yang relatif murah, jarak antara kegiatan ekonomi dengan sumber bahan baku dan energi.

d. Teori Tempat Sentral

”Teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of place*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya” (Lincoln Arsyad, 2009:117).

”Teori ini telah merintis analisis tata ruang yang menekankan pada identifikasi sistem wilayah baik secara fisik ataupun ekonomi yang memiliki pola distribusi kegiatan-kegiatan produksi dan daerah-daerah perkotaan secara herarkis” (Christaller dalam Rahardjo Adisasmita, 2005: 51). Pada dasarnya teori ini menitikberatkan pada masalah-masalah lokasi dan pengelompokan kegiatan ekonomi secara geografis sehingga akan ada daerah industri, daerah pemukiman dan sebagainya. Kelemahannya adalah kurang mempertimbangkan pada faktor-faktor yang sebenarnya bisa menghemat biaya.

e. Teori Kausasi Kumulatif

Menurut Myrdal dalam Mudrajad Kuncoro (2004: 133) ”Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan”. Teori ini beranggapan bahwa terdapat perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah. Akibatnya, terdapat daerah maju dan daerah yang kurang berkembang. Meminimalisir ketidakmerataan pembangunan tidak boleh hanya diserahkan pada mekanisme pasar, karena investor cenderung memilih wilayah maju untuk menanamkan modalnya, sehingga wilayah yang maju semakin maju sedangkan wilayah yang terbelakang akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, campur tangan aktif dari pemerintah perlu dilakukan melalui program-program pembangunan.

4. Pengembangan Sektor Unggulan

Setiap daerah mempunyai keterbatasan tertentu, baik dalam hal dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lain-lain. Alasan tersebut dijadikan dasar bagi setiap daerah untuk bisa menetapkan prioritas pembangunan, sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan menunjukkan perhatian utama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konsentrasi kegiatan ekonomi dan sektor unggulan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam penentuan prioritas pembangunan karena dianggap mampu mempercepat suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Unsur-unsur pertumbuhan baik di negara maju maupun di negara berkembang tidak ada yang berbeda, yang membedakan terletak pada kebutuhan dan tingkat kelangkaan faktor-faktor produksi. Ada beberapa aspek penting yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah terkait dengan upaya pengembangan komoditi unggulan (Sjafrizal, 2009: 173), yaitu:

a. Pemasaran Hasil Produksi

Tersedianya bahan baku yang melimpah dan berpotensi ekspor tidak menjamin keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, tanpa adanya strategi pemasaran didalamnya. Akses informasi pasar yang cepat dan menyebar keseluruh wilayah dapat membantu masyarakat dalam upaya mengembangkan pasar lebih luas lagi, tidak hanya lingkup domestik namun internasional. Berdasarkan hal tersebut, perlu didirikan lembaga atau forum yang memfasilitasi pertukaran informasi pasar antara pelaku ekonomi sektor swasta, sektor publik serta masyarakat.

b. Sumber Daya Alam

Perlu adanya pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam yang belum sepenuhnya atau sama sekali belum digali. Sumber ini dapat berupa barang tambang, tanah untuk pertanian dan tingkat kesuburan, sumber air tawar, iklim yang cocok untuk tanaman perdagangan tertentu dan sebagainya.

c. Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan atas pembangunan daerah. Meningkatkan pendidikan dan latihan ketrampilan untuk SDM sehingga melahirkan tenaga-tenaga ahli dibidangnya yang mampu mengelola perekonomian daerah menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, penyaluran dan penempatan tenaga kerja perlu mendapat perhatian sebagai proyek dalam upaya penyiapan dan penyediaan tenaga kerja.

d. Tingkat Teknologi

Pergantian alat-alat tradisional ke alat-alat yang lebih modern dan maju, akan memudahkan kinerja sehingga mencapai hasil yang lebih cepat dan efisien.

e. Akses ke Sumber Modal

Permodalan sering kali menjadi penghambat kemajuan suatu usaha masyarakat. Akses ke sumber modal harus dipermudah, sehingga pelaku usaha mampu mengembangkan usaha mereka dan pemberdayaan usaha masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Perumusan kebijakan pembangunan perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait, seperti visi dan misi pembangunan, kondisi dan potensi daerah, permasalahan pokok pembangunan dan proyeksi pembangunan ke depan. Meskipun demikian, tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Pada dasarnya ada empat peran yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 2009: 121), yaitu:

a. Wirausaha (*Entrepreneur*)

Pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan suatu usaha bisnis, dengan mengelola aset-aset daerah secara optimal sehingga secara ekonomis menguntungkan.

b. Koordinator

Pemerintah bertindak sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peran ini mampu melibatkan kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Pemerintah daerah juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga perusahaan yang sudah ada tetap berada di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembangunan jalan dan jembatan, membantu industri kecil melakukan pameran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala upaya pengembangan sektor unggulan tidak terlepas dari peran pemerintah yang bekerjasama dengan sektor swasta untuk mengelola sumberdaya yang tersedia secara optimal untuk menciptakan kesempatan kerja. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama atas segala usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah.

5. Sektor Unggulan dalam Pengembangan Wilayah

Setiap strategi pembangunan yang diambil, pemerintah dituntut mampu mengusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, sebagai jaminan terlaksananya pembangunan nasional secara integral dan

commit to user

menyeluruh. Melihat hal tersebut, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan potensi sumberdaya serta kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan, selain itu juga terdapat permasalahan yang berbeda pula yang harus dihadapi oleh masing-masing wilayah, sehingga perlu adanya penanganan yang serius di tiap wilayah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.

Wilayah yang akan dikembangkan terdapat sektor atau lapangan usaha yang potensial dan strategis untuk menunjang pembangunan. Wilayah yang dimaksud merupakan wilayah andalan dan mempunyai sektor unggulan. Sektor unggulan yang dimaksud adalah (Rahardjo Adisasmita, 2005: 127):

- a. Sektor yang menghasilkan produksi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah (PDRB)
- b. Sektor yang memberikan lapangan kerja yang besar, sehingga menciptakan pendapatan bagi masyarakat
- c. Sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan yang kuat bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya
- d. Sektor yang menghasilkan ekspor non migas (menghasilkan devisa)
- e. Sektor yang pada saat sekarang memberikan kontribusi yang kecil, tetapi mempunyai potensi yang menjanjikan di masa yang akan datang

Pembangunan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan pada semua sektor dan menyeluruh disetiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor, namun hanya pada sektor basis yang mampu tumbuh pesat di banding sektor lain. Sektor basis inilah yang akan mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan sektor lain yang kurang potensial, karena sektor basis mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) yang nantinya dapat memicu pertumbuhan sektor lain. Sektor unggulan akan mendorong pertumbuhan tidak hanya bagi daerah setempat saja, tapi juga pada daerah-daerah sekitarnya. Pusat pertumbuhan diperlukan sebagai perangsang bagi pertumbuhan daerah sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi unggulan mampu memberikan peluang bagi perkembangan sektor

lainnya yang terkait, baik sebagai input maupun sebagai dampak positif karena mampu menyerap tenaga kerja dari sektor unggulan yang mengalami kenaikan pendapatan. Hal inilah yang dijadikan alasan, mengapa sektor unggulan dijadikan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah.

6. Teori Basis Ekonomi

Menurut Glasson (1990: 63) perekonomian regional dibedakan menjadi dua sektor, yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Sektor basis adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa selain untuk memenuhi kebutuhan dari dalam daerah juga melayani permintaan di luar daerah (ekspor), sedangkan sektor non basis hanya sanggup memenuhi kebutuhan daerah setempat saja.

Apabila dilihat dari sektor non basis, sektor produksi akan meningkat jika permintaan akan barang maupun jasanya meningkat. Permintaan tersebut tergantung pada pendapatan masyarakat setempat, sedangkan pendapatan masyarakat lokal tergantung pada permintaan faktor-faktor produksi oleh sektor produksi setempat. Berlandaskan pada tergangungnya sektor nonbasis pada pendapatan masyarakat lokal, maka perekonomian daerah tidak akan mampu berkembang melebihi pertumbuhan pendapatan masyarakat setempat.

Lain halnya dengan sektor basis, permintaan sektor produksi tidak hanya terbatas pada permintaan lokal, tetapi juga oleh permintaan dari daerah lain (ekspor). Konsep basis ekonomi mengasumsikan bahwa perekonomian daerah dapat meningkat jika semakin banyak permintaan terhadap barang dan jasa oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non basis (lokal). Suatu daerah yang mampu mengembangkan dan meningkatkan sektor basis, maka secara tidak langsung akan mendorong kegiatan sektor non basis sehingga pendapatan lokal akan meningkat melebihi pertumbuhan pendapatan lokal yang hanya mengandalkan sektor non basis. Oleh karena itu, sektor basis dapat dijadikan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi dan mempunyai nilai efek pengganda basis terhadap pendapatan suatu wilayah (Glasson, 1990: 64).

Ekspor akan mendatangkan pendapatan dari luar daerah, sehingga akan menambah arus pendapatan di dalam wilayah yang bersangkutan. Akibatnya, konsumsi dan investasi di dalam daerah ikut meningkat. Pendapatan yang meningkat membuat masyarakat lebih banyak menyimpan pendapatan mereka untuk ditabung, sehingga bisa dipinjamkan kepada dunia usaha maupun pemerintah di dalam daerah, bahkan bisa mendatangkan investasi dari luar wilayah karena investor cenderung memilih daerah yang sudah maju karena dianggap mempunyai prospek yang menguntungkan. Hal ini jelas akan menambah kekayaan daerah, yang kemudian oleh daerah pendapatan tersebut akan digunakan sebagai modal dalam membangun wilayahnya. Konsumsi masyarakat akan barang/jasa yang meningkat mengindikasikan bahwa permintaan akan hasil produksi juga meningkat. Upaya pemenuhan permintaan konsumen membuat industri-industri ini mengerahkan kemampuan mereka dalam menggerakkan faktor-faktor produksi yang ada, termasuk tenaga kerja. Tidak hanya itu, lapangan kerja semakin terbuka lebar dengan terpicunya kegiatan non basis sebagai akibat kegiatan basis yang menciptakan peluang kerja baru. Oleh karena itu, ekspor daerah (regional) dianggap sebagai penentu dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Richardson dalam Rahardjo Adisasmita (2005: 28) berpendapat bahwa analisis basis ekonomi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sektor basis. Perhatian pembangunan akan lebih dipusatkan pada sektor-sektor unggulan (sektor basis) yaitu pada industri-industri yang berorientasi ekspor yang menggunakan sumberdaya lokal. Kegiatan basis yang semakin meningkat dalam suatu wilayah akan menyebabkan bertambahnya pendapatan regional, yang akan diikuti oleh bertambahnya permintaan akan barang dan jasa dalam wilayah tersebut, dan pada akhirnya akan menambah volume kegiatan non basis.

Pada dasarnya, ada dua kategori untuk membagi daerah ke dalam kegiatan basis dan non basis, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Namun, banyak pakar ekonomi lebih memilih metode tidak langsung (Glasson, 1990: 60-68), seperti:

- a. Metode Arbiter, dilakukan dengan cara membagi secara langsung mana yang termasuk kategori ekspor dan non ekspor tanpa melalui penelitian secara

commit to user

spesifik di tingkat regional. Metode ini tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor atau dijual secara lokal maupun kedua-duanya.

- b. Metode *Location Quotient (LQ)*, merupakan suatu alat analisis untuk melihat peranan suatu sektor tertentu dalam suatu wilayah terhadap peranan sektor tersebut ke dalam wilayah yang lebih luas.
- c. Metode kebutuhan minimum, merupakan modifikasi dari LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari *employment* yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata. Metode ini tergantung pada pemilihan presentase minimum dan tingkat disagregasi. Adanya disagragasi yang terlalu terperinci mengakibatkan hampir semua sektor menjadi kegiatan-kegiatan basis atau ekspor.

Metode yang sering digunakan dalam kalangan akademis adalah metode *Location Quotient* karena dianggap mempunyai kebaikan yang mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dampak umum dari perubahan-perubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek. Penggunaan metode LQ berasumsikan bahwa (Lincoln Arsyad, 2009: 142):

- a. Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama pada pola permintaan tingkat nasional
- b. Produktivitas tenaga kerja sama
- c. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor

7. Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap wilayah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah menjadi dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Mudrajad Kuncoro (2003: 101) mengatakan bahwa dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai

sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan domestik regional domestik bruto (PDRB) perkapita sebagai sumbu horisontal, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata-rata nasional.
- b. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang relatif maju, tetapi dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Daerah ini merupakan daerah yang sudah maju, tetapi untuk masa yang akan datang, laju pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
- c. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang dapat berkembang pesat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tetapi belum diolah sepenuhnya dengan baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat pendapatan perkapita yang mencerminkan dari tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
- d. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pada rata-rata nasional. Menurut Klassen dalam Lincolin Arsyad (2009: 147) daerah tertekan terjadi karena kondisi wilayahnya yang kurang menguntungkan dan kurang bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Daerah ini tidak dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya, bahkan dalam satu cabang.

Tabel 2. Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen

Laju pertumbuhan (r) \ PDRB perkapita (Y)	$y_i > y$	$y_i < y$
	$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
$r_i < r$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Keterangan:

- r_i : rata-rata laju pertumbuhan kabupaten/kota yang diamati
 r : rata-rata laju pertumbuhan nasional (Subosukawonosraten)
 y_i : rata-rata PDRB perkapita kabupaten/kota yang diamati
 y : rata-rata PDRB perkapita nasional (Subosukawonosraten)

8. BKAD Subosukawonosraten

BKAD Subosukawonosraten merupakan bentuk kerjasama antardaerah yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten, yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Tujuan kerjasama adalah meningkatkan daya saing ekonomi wilayah melalui penguatan manajemen wilayah, peningkatan pemasaran wilayah, penciptaan iklim bisnis yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha, serta memberikan dukungan terhadap usaha mikro kecil, menengah, dan pada sektor-sektor unggulan di wilayah Subosukawonosraten.

Berikut merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan wilayah Subosukawonosraten, adalah:

a. Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Subosukawonosraten

Kerjasama antar daerah meliputi bidang: ketenagakerjaan dan kepegawaian; bidang tata ruang dan sumberdaya serta lingkungan hidup; pembangunan sarana dan prasarana; perhubungan dan pariwisata; kependudukan, pemukiman dari masalah sosial; air bersih; perdagangan dan

commit to user

perindustrian; penelitian dan pengembangan iptek; sumberdaya manusia; kesehatan; pengairan dan pertanian; serta bidang lain yang dianggap perlu.

b. Kerjasama Bidang Hubungan Darat Subosukawonosraten

Kerjasama ini meliputi bidang: lalu lintas berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pengendalian operasional. Bidang lainnya adalah bidang angkutan umum berupa jenis pelayanan, kriteria pelayanan, perijinan angkutan, penetapan tarif angkutan penumpang dan pengujian kendaraan umum.

c. Kerjasama Bidang Pemadam Kebakaran Subosukawonosraten

Kerjasama ini meliputi bidang operasional bidang pemadam kebakaran. Kegiatan tersebut berupa penanggulangan bahaya kebakaran, peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di bidang pemadam kebakaran, pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran, informasi dan komunikasi di bidang pemadam kebakaran, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

d. Kerjasama Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya Subosukawonosraten

Kerjasama dalam bidang ini berupa promosi, seminar, dialog, mengikuti pekan pariwisata dan studi banding.

e. Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup Subosukawonosraten

Program lingkungan hidup meliputi: lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan, dan lingkungan hidup buatan. Kegiatannya berupa peningkatan komunikasi dan edukasi masyarakat di bidang lingkungan.

f. Kerjasama Bidang Litbang dan Iptek Subosukawonosraten

Kerjasama ini meliputi bidang penelitian dan pengembangan iptek. Kegiatan berkaitan dengan bidang tersebut adalah: koordinasi antar unit kerja litbang Subosukawonosraten, lokakarya, seminar, workshop, pameran-pameran iptek, penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan, peningkatan sumber daya manusia aparatur litbang dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan dan pekan lingkungan Indonesia.

g. Kerjasama Bidang Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Subosukawonosraten

Kegiatan kerjasama yang berkaitan dengan bidang tersebut adalah: pertukaran buletin, koordinasi bidang informasi komunikasi dan kehumasan, dan pameran serta promosi.

h. Kerjasama Bidang Ketentraman dan Ketertiban Subosukawonosraten

Kerjasama ini meliputi bidang: ketentraman dan ketertiban umum; penegakan peraturan daerah serta pengamanan serta pengawalan pejabat/orang-orang penting.

Menurut Thres Sanctyeka (2009: 24) mengatakan bahwa keuntungan diadakannya kerjasama antar daerah adalah:

- a. Daerah-daerah yang membentuk kerjasama daerah secara alami akan dapat membentuk kekuatan yang lebih besar sehingga kekuatan dari masing-masing daerah dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
- b. Daerah-daerah yang membentuk kerjasama daerah akan secara bersama-sama membentuk kemajuan yang lebih baik secara bersama. Ini dikarenakan dengan kerjasama, masing-masing daerah dapat saling mentransfer sumberdaya baik berupa pendanaan, sumberdaya manusia (kepandaian, ketrampilan, dan informasi), serta sumberdaya alam.
- c. Daerah-daerah yang membentuk kerjasama daerah akan memiliki posisi tawar yang lebih baik jika dibandingkan ketika mereka berjalan sendiri-sendiri, sehingga daerah memiliki kekuatan di dalam menegosiasikan kepentingannya baik pada struktur pemerintahan yang lebih tinggi maupun kepada lembaga berbadan hukum dari dalam maupun luar negeri.
- d. Daerah-daerah yang melakukan kerjasama, mampu meminimalisir konflik horizontal maupun konflik yang disebabkan oleh kompetisi antar wilayah yang mengedepankan primordialisme.
- e. Daerah-daerah yang membentuk kerjasama daerah melakukan efisiensi sumberdaya dengan menghindari duplikasi pelayanan.

f. Dan keuntungan lainnya adalah adanya bisa berbagi antara resiko dan keuntungan yang diperoleh (*sharing of risk and benefit*)

Pada dasarnya peran kerjasama antar daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya termasuk dalam hal kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai analisis perekonomian daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Alat analisis yang digunakan sebagian besar adalah *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, *Multiplier effect*, Tipologi Klassen, dan Ketimpangan regional. Prasetyo Soepono melakukan penelitian pada tahun 2001 dengan judul “Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat Analisis Regional”. Hasil penelitiannya adalah bahwa teori basis ekonomi diperlukan untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah suatu sektor atau industri merupakan suatu sektor industri basis/ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi atau tidak. Model ini digunakan setelah diukur dan diurai perubahan pertumbuhan suatu variabel daerah (seperti, *employment*, pendapatan, *output*, nilai tambah, dsb) di tiap sektor/industri di suatu daerah selama kurun waktu tertentu dengan analisis *shift share*. Inilah posisi teori basis ekspor, yakni kelanjutan dari analisis *shift share*. Dengan pengganda basis ekonomi dapat diramal berapa kali lipat pendapatan suatu daerah sebagai akibat kenaikan ekspor pada tingkat yang lebih tinggi. Ini merupakan kontribusi teori basis ekonomi. Studi basis ekonomi lebih tepat digunakan untuk daerah kecil seperti desa, kecamatan, kabupaten (yang sekarang ini sedang digalakkan pengembangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah) di Indonesia, sebab semakin besar suatu daerah, makin kurang penting ekspor dan makin kurang penting teori basis ekspor dalam menggambarkan pertumbuhan. Inilah peranan lain dari variabel basis ekonomi adalah yang pertama menerapkan model ekonomi makro tentang

commit to user

penentuan pendapatan di suatu daerah, dan pengganda basis ekonomi merupakan bagian integral.

Penelitian lain dilakukan oleh Lili Masli tahun 2008 yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama tahun 1993-2006 mengalami fluktuasi dan menunjukkan arah yang negatif apabila dibandingkan pada awal penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat adalah: teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, peningkatan pendapatan, dan perubahan selera konsumen.

Pada umumnya Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Tipologi Klassen termasuk klasifikasi daerah relatif tertinggal. Penyebabnya adalah terjadinya aliran investasi dari daerah relatif miskin ke daerah relatif kaya. Gejala ini disebabkan oleh mekanisme pasar, dan terjadi kombinasi dua faktor yaitu:

1. Tabungan yang ada di daerah miskin walaupun jumlahnya kecil, tidak dapat digunakan secara efektif karena kurangnya permintaan investasi daerah tersebut
2. Tabungan akan diinvestasikan ke daerah yang relatif kaya, karena akan lebih terjamin dan memberikan keuntungan yang lebih besar.

Akibatnya, dalam proses pembangunan daerah miskin akan semakin sulit berkembang menjadi daerah kaya atau semakin timpang. Oleh karena itu, harus dilakukan percepatan dalam mengejar ketertinggalan dengan dipenuhinya infrastruktur dasar masyarakat, pemberian bantuan modal serta melakukan penguatan kelembagaan masyarakat pedesaan.

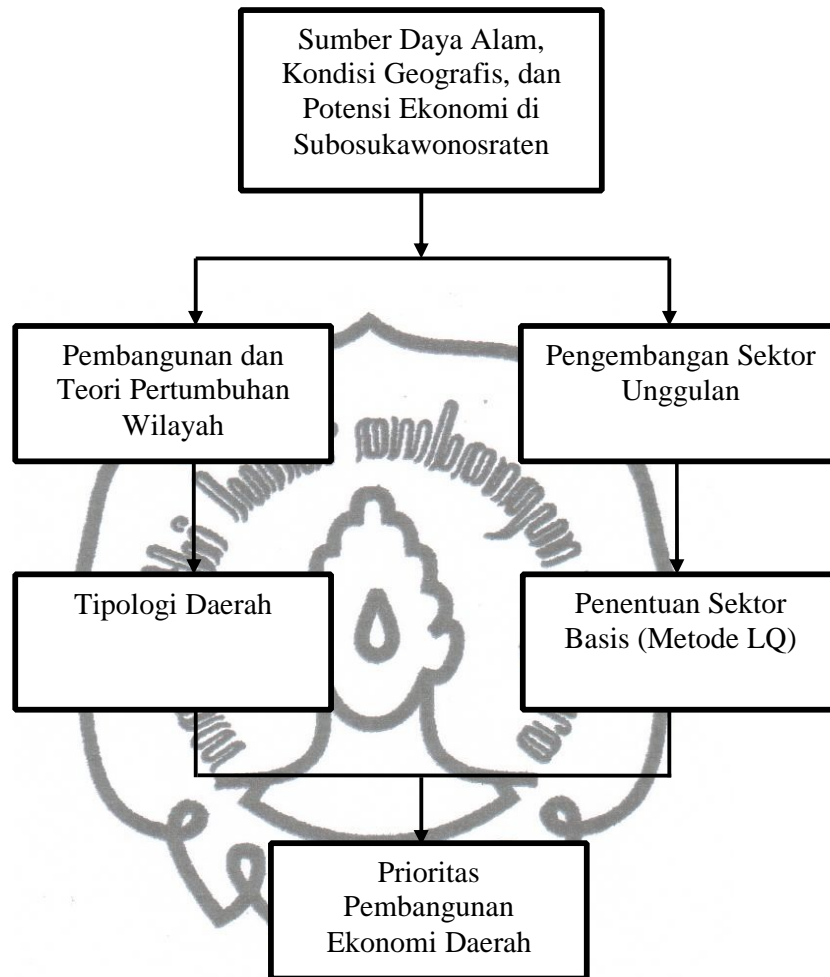
Hasil lain dapat diketahui juga bahwa dengan menggunakan PDRB, tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat cenderung meningkat berdasarkan indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropi Theil. Penyebabnya adalah adanya perubahan laju pertumbuhan ekonomi negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.

Penelitian dengan menganalisis perekonomian daerah jumlahnya masih sangat terbatas. Oleh karena itu penulis mencoba menguji kembali dengan metode analisis yang sama yaitu *Location Quotient* (LQ) dan Tipologi Klassen. Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan Subosukawonosraten sebagai subyek penelitian karena dianggap sesuai dengan cakupan masalah yang penulis ajukan.
2. Periode pengamatan penelitian ini dilakukan pada tahun 2004 – 2008.
3. Penelitian dari Prasetyo Soepono hanya mengkaji sumbangan dari alat analisis ekonomi regional terhadap perekonomian daerah terutama dalam menggambarkan pertumbuhan ekonominya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis langsung implementasi penggunaan alat analisis ekonomi regional terhadap daerah Subosukawonosraten.
4. Lain halnya dengan Lili Masli yang melakukan penelitian pada pengaruh dari laju pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional, sedangkan penulis mengfokuskan pada pengidentifikasian sektor basis di Subosukawonosraten yang dijadikan prioritas pembangunan serta bagaimana mengembangkannya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arahan penalaran untuk dapat sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Secara sederhana kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pembangunan daerah, pada dasarnya difokuskan pada penetapan formulasi kebijakan pembangunan yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Adapun tolok ukur yang bisa dijadikan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan melihat besarnya PDRB yang dihasilkan, pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita. Perkembangan positif dari ketiga alat yang dijadikan tolok ukur tersebut menandakan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah berhasil, begitu pula sebaliknya.

Karakteristik pertumbuhan masing-masing daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masing-masing daerah.

Lain halnya dengan data PDRB, digunakan untuk mengetahui output secara fisik yang dihasilkan oleh setiap sektor, yang dijadikan dasar dalam menentukan keunggulan atau kebasisan suatu sektor. Sektor basis dianggap sebagai penggerak dalam perekonomian karena mampu merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi lain, oleh sebab itu dapat diketahui secara jelas sektor apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah. Diketuinya sektor basis, menjadikan pemerintah mampu membuat kebijakan pembangunan lebih jelas yaitu dengan mengupayakan pengembangan sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian. Peneliti melihat apakah upaya pengembangan sektor unggulan yang dilaksanakan pemerintah telah sesuai dengan teori teknik perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

“Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus-menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan” (Bendavid-Val dalam Lincoln Arsyad, 2009:135). Diketuinya struktur pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di setiap daerah dapat dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah sehingga pembangunan akan lebih terarah, serta dengan melihat kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor unggulan yang dibandingkan dengan teori perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi kajian bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih matang untuk periode selanjutnya.

D. Hipotesis

Hipotesis menurut Mudrajad Kuncoro (2003: 59) adalah “Suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi”. Hipotesis dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah yang diteliti, fakta serta kerangka teoritis. Hipotesis yang penulis ajukan adalah:

1. Diduga terdapat pengelompokan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Subosukawonosraten tahun 2004-2008.

2. Upaya mengembangkan sektor ekonomi unggulan yang potensial sebagai penggerak perekonomian antar Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten dilakukan dengan:
 - a. Peningkatan pemasaran hasil produksi
 - b. Pengoptimalan pemanfaatan sumberdaya alam
 - c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
 - d. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna
 - e. Memperluas akses ke sumber modal



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Subosukawonosraten, dengan obyek penelitian pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten. Alasan memilih Subosukawonosraten sebagai subyek penelitian adalah:

- a. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti
- b. Tersedia data yang diperlukan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data dan penyusunan laporan penelitian. Dalam hal ini, waktu penelitian yang penulis rencanakan mulai bulan Agustus 2010.

B. Populasi

1. Penetapan Populasi

Dalam suatu penelitian selalu terdapat populasi yang akan diselidiki. Soeratno dan Lincolin Arsyad (2008: 101) menyebutkan “Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang diteliti”. Pendapat lain dikemukakan oleh Mudrajad Kuncoro (2003: 103) “Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan dari subyek maupun obyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Subosukawonosraten.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang ditebitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2008: 71). Data sekunder ini telah dikumpulkan sebelumnya oleh lembaga pengumpul data yang kemudian dipublikasikan kepada orang atau organisasi yang ingin menggunakan data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *pooling* di Subosukawonosraten. Data *pooling* merupakan kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Data runtut waktu merupakan suatu data yang disusun berdasarkan urutan kejadian berdasarkan variabel tertentu yang telah ditentukan, sedangkan data silang tempat merupakan data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (Mudrajad Kuncoro, 2003).

Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi data silang tempat adalah Subosukawonosraten, yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, sedangkan data runtut waktu yang diteliti 5 tahun. Data tersebut diambil dalam rentang pengamatan dari tahun 2004–2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Bappeda dari masing-masing kabupaten/kota.

a. Variabel Penelitian

Suharsimi Arikunto (1998: 33) berpendapat bahwa “Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Dalam hal ini yang menjadi variabel penelitian adalah:

1) Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Variabel yang digunakan untuk menentukan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di masing-masing kabupaten/kota dari Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), serta rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Subosukawonosraten.

2) Upaya Pengembangan Sektor Unggulan

Variabel yang digunakan untuk mengetahui sektor unggulan di Subosukawonosraten adalah PDRB masing-masing kota/kabupaten di Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) menurut lapangan usaha berdasar harga konstan tahun 2000 sebagai daerah studi dan PDRB Subosukawonosraten menurut lapangan usaha berdasar harga konstan tahun 2000 sebagai daerah referensi. Setelah dianalisis yang menjadi sektor unggulan, maka dilihat apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor unggulan tersebut.

b. Definisi Variabel Penelitian

1) Pertumbuhan Ekonomi

Maksud pertumbuhan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB rata-rata yang dihitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

2) Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan perkiraan pendapatan perorangan yang dihasilkan dari PDRB pertahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun atau dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

3) Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor ekonomi yang dimiliki daerah yang dianggap layak untuk dikembangkan karena dirasa mampu meningkatkan kegiatan perekonomian setempat secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya serta dapat memicu perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain.

4) Upaya Pengembangan Sektor Unggulan

Upaya pengembangan sektor unggulan yang dimaksud adalah usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah berupa kebijakan dan strategi-strategi untuk memajukan sektor-sektor unggulan agar perekonomian daerah semakin baik lagi.

5) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah, yang dapat dilihat berdasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB pada tingkat regional (provinsi, kabupaten, kota) adalah menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan output nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan PDRB harga konstan pada tahun 2000. Penggunaan PDRB atas harga konstan dilakukan dengan alasan supaya dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ketahun.

6) Sektor-sektor ekonomi

Terdapat sembilan sektor ekonomi di tiap-tiap kabupaten/kota. Adapun sektor-sektor ekonomi yang dimaksud, yakni:

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Pertambangan dan Galian
- c. Sektor Industri Pengolahan
- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
- e. Sektor Bangunan
- f. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- i. Sektor Jasa-Jasa

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. "Studi dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat kertas dan orang" (Suharsimi Arikunto, 1998: 131). Dokumen yang dipilih adalah dokumen yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Data pertumbuhan ekonomi

commit to user

- 2) Data PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan tahun 2000
- 3) Data PDRB perkapita
- 4) Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor unggulan

D. Rancangan Penelitian

1. Jenis Rancangan Penelitian

Riset atau penelitaian oleh Uma Sekaran (2006: 4) diartikan sebagai “Proses menemukan solusi masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi”. Rancangan penelitian berarti rencana yang disusun dengan maksud agar dalam proses menemukan solusi dari masalah yang diteliti dapat dilakukan secara efektif dan sistematis sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan sehingga penelitian bisa dibuat serelevan dan seefisien mungkin.

Soeratno dan Lincoln Arsyad (2008: 34) berpendapat bahwa rancangan penelitian dibuat guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap setiap langkah dalam upaya untuk memecahkan masalah secara efektif. Dalam membuat suatu rancangan penelitian dapat digunakan beberapa pendekatan yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian itu sendiri, khususnya pada persoalan yang dihadapi. Menurut Mudrajad Kuncoro (2003: 72-75), jenis penelitian ada dua, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Eksploratif (*Explorative Research*)

Penelitian eksploratif (*explorative research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian yang selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Penelitian Konklusif (*Conclusive Research*)

Penelitian konklusif (*conclusive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji atau membuktikan sesuatu dan untuk membantu si peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya.

Penelitian konklusif dibagi menjadi dua jenis, yaitu studi deskriptif (*descriptive study*) dan studi eksperimental (*experimental study*). Studi deskriptif

bertujuan untuk memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti. Studi eksperimental merupakan bentuk riset konklusif yang bertujuan untuk memperoleh pengujian yang tepat dalam menarik kesimpulan hubungan sebab akibat antar variabel.

Penelitian ini menggunakan data sekunder *pooling* pada tiap-tiap kota/kabupaten di Subosukawonosraten tahun 2004–2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif merupakan pengumpulan data yang dianalisis guna mengetahui kondisi terakhir dari subyek yang diteliti. Peneliti berusaha mendapatkan gambaran yang benar dan apa adanya mengenai suatu obyek dengan menggunakan pedoman semua teori yang ada kaitannya dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data yang jelas. Penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan angka-angka untuk menggambarkan suatu kondisi.

Data-data berupa laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Subosukawonosraten yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Tipologi Klassen untuk mengetahui struktur perekonomian di tiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten. Data lain berupa PDRB menurut lapangan usaha dengan tahun dasar 2000 diolah untuk mengetahui sektor mana saja yang merupakan sektor basis untuk dikembangkan lebih lanjut karena dianggap dapat memicu perekonomian daerah. Sektor unggulan yang sudah diketahui kemudian dijadikan prioritas pembangunan, karena dianggap sebagai penggerak perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mengembangkan sektor unggulan. Peneliti melihat apakah kebijakan pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan teori perencanaan dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan peneliti menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif adalah:

- a. Penelitian dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang yaitu untuk mengetahui struktur ekonomi serta mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor unggulan di Subosukawonosraten dan upaya pengembangan sektor unggulan.

- b. Penelitian ini menggunakan tahapan yang sistematis yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan data.
- c. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumenter.

E. Teknik Analisis Data

Tahap analisis adalah tahap yang harus dilakukan setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan. Analisis data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut Soeratno dan Lincoln Arsyad (2008: 117) "Analisis kualitatif dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun atau diklasifikasikan. Lain halnya dengan analisis kuantitatif, yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori".

1. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB perkapita daerah sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati akan terbagi menjadi empat golongan, (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, 2004: 130), yaitu:

- 1) Tipologi I : Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan rata-rata PDRB di atas pertumbuhan PDRB di daerah Subosukawonosraten dan pendapatan perkapita di atas rata-rata pendapatan perkapita di daerah Subosukawonosraten.
- 2) Tipologi II : Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan rata-rata PDRB lebih rendah dari pertumbuhan PDRB di daerah Subosukawonosraten dan

pendapatan perkapita rata-rata di atas rata-rata pendapatan perkapita di daerah Subosukawonosraten.

- 3) Tipologi III : Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan rata-rata PDRB di atas pertumbuhan PDRB di daerah Subosukawonosraten dan pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata pendapatan perkapita di daerah Subosukawonosraten.
- 4) Tipologi IV: Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan rata-rata PDRB dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pertumbuhan PDRB dan rata-rata pendapatan perkapita di daerah Subosukawonosraten.

Tabel 3. Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen

Laju pertumbuhan (r)	PDRB perkapita (Y)	
	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Keterangan:

r_i : rata-rata laju pertumbuhan kabupaten/kota yang diamati

r : rata-rata laju pertumbuhan nasional (Subosukawonosraten)

y_i : rata-rata PDRB perkapita kabupaten/kota yang diamati

y : rata-rata PDRB perkapita nasional (Subosukawonosraten)

Diharapkan dari analisis ini dapat ditentukan tipologi masing-masing Kabupaten/kota yang dapat digunakan sebagai acuan pendukung untuk menentukan prioritas dalam pengembangan pembangunan wilayah.

2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

“*Location Quotient* (LQ) yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional” (Lincoln Arsyad, 2009: 141).

Rumus untuk menghitung *Location Quotient* (Soepono, 2001):

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan:

LQ = Koefisien *Location Quotient*

E_{ij} = Variabel regional (pendapatan regional, *employment*, dsb) di sektor i di wilayah j

E_j = Variabel regional di wilayah j

E_{in} = Variabel regional di sektor i di perekonomian nasional sebagai perekonomian *benchmark*/patokan/acuan

E_n = Variabel regional di perekonomian nasional.

Semakin tinggi nilai LQ suatu sektor berarti semakin tinggi pula keuntungan kompetitif (*competitif advantage*) daerah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor tersebut. Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat diartikan ke dalam tiga kategori:

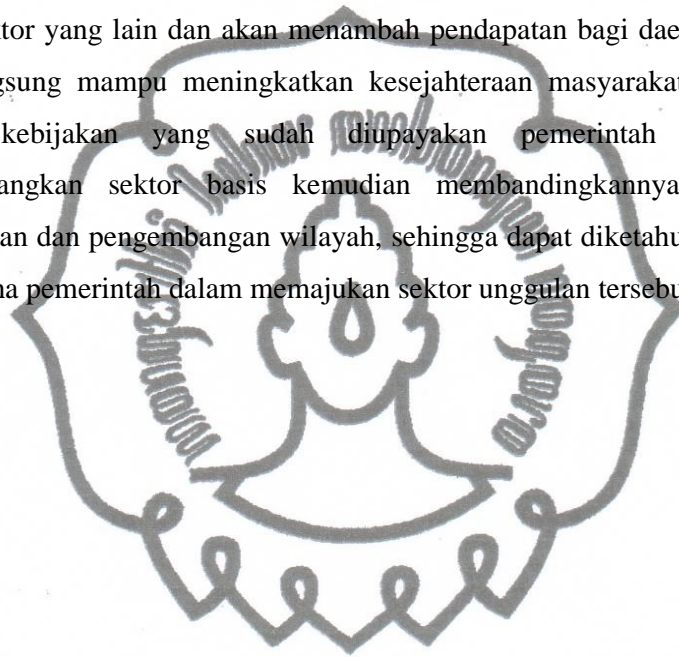
$LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut basis, yaitu sektor tersebut mempunyai prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan, karena mampu di alokasikan ke daerah lain.

$LQ = 1$ berarti semua permintaan akan output suatu sektor dipenuhi oleh sektor tersebut di daerah maupun didaerah himpunan.

$LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut non basis dan kurang menguntungkan untuk dikembangkan serta belum mampu memenuhi semua permintaan dari dalam daerah sehingga harus mendatangkan dari daerah lain.

3. Upaya Pengembangan Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor yang mendapat perhatian utama dalam pembangunan ekonomi karena dianggap sebagai cara tercepat untuk memperbaiki perekonomian daerah. Berdasarkan alasan inilah, mengapa pemerintah daerah harus benar-benar berusaha untuk bisa memajukan sektor unggulan tersebut. Sektor unggulan akan menciptakan efek pengganda bagi sektor-sektor yang lain dan akan menambah pendapatan bagi daerah yang secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti akan melihat kebijakan yang sudah diupayakan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor basis kemudian membandingkannya dengan teori perencanaan dan pengembangan wilayah, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana usaha pemerintah dalam memajukan sektor unggulan tersebut.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data diartikan sebagai suatu gambaran yang menjelaskan mengenai data yang telah dikumpulkan di tiap-tiap variabelnya. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Struktur Pertumbuhan Ekonomi

a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004-2008

Pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten dihitung rata-ratanya, yang dimulai tahun 2004 sampai dengan 2008. Data diukur dalam persen. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) dan pertumbuhan ekonomi di daerah referensinya yaitu Subosukawonosraten itu sendiri. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten tahun 2004-2008.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten dan Jawa Tengah tahun 2004-2008 (persen)

Kabupaten\Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata
Surakarta	5.8	5.15	5.43	5.82	5.69	5.58
Boyolali	3.43	4.07	4.19	4.19	4.04	3.98
Sukoharjo	4.33	4.11	4.53	5.11	4.84	4.58
Karanganyar	5.98	5.49	5.08	5.74	5.75	5.61
Wonogiri	4.1	4.31	4.07	5.07	4.27	4.36
Sragen	4.93	5.16	5.18	5.73	5.69	5.34
Klaten	4.86	4.59	2.3	3.31	3.93	3.80
Subosukawonosraten	4,83	4,70	4,35	4,94	4,90	4,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di Subosukawonosraten cukup fluktuatif,

walaupun dari tahun 2004-2008 selalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang selalu positif. Hampir semua kabupaten mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat menginjak tahun 2008 kecuali Kabupaten Wonogiri dan Klaten. Klaten mengalami kenaikan pertumbuhan di tahun 2008, namun perkembangannya dari tahun 2004 hampir di setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan sistem keuangan dunia yang menurun yang berdampak pada perekonomian daerah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karanganyar sebesar 5,61%, diikuti Kota Surakarta yaitu 5,58%, sedangkan terendah diperoleh Kabupaten Klaten, yaitu 3,8%. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten juga mengalami fluktuatif, dengan pertumbuhan terendah ada pada tahun 2006 yaitu sebesar 4,35%.

b. PDRB Perkapita tahun 2004-2008

PDRB perkapita diperoleh dari pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Data diukur dengan satuan rupiah. Pendapatan perkapita dalam penelitian ini meliputi PDRB perkapita di setiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten tahun 2004-2008 dan PDRB perkapita pada Subosukawonosraten tahun 2004-2008. Adapun data PDRB perkapita di Subosukawonosraten adalah sebagai berikut:

Tabel 5. PDRB Perkapita Masing-Masing Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten tahun 2004-2008 (rupiah)

Kab.\Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata
Surakarta	7.152.440,14	7.220.682,75	7.930.485,11	8.351.806,79	8.699.633,71	7.871.009,70
Boyolali	3.542.803,27	3.675.934,47	3.822.175,15	3.963.925,99	4.113.171,39	3.823.602,05
Sukoharjo	4.663.340,42	4.818.034,82	5.000.457,94	5.222.682,35	5.440.423,48	5.028.987,80
Karanganyar	4.802.551,49	5.012.698,89	5.230.684,26	5.688.489,19	5.953.118,19	5.337.508,40
Wonogiri	2.088.959,26	2.170.894,89	2.250.979,60	2.307.122,28	2.311.917,76	2.225.974,76
Sragen	2.584.378,30	2.710.505,84	2.836.602,95	2.982.978,18	3.146.079,32	2.852.108,92
Klaten	3.107.333,54	3.238.691,94	3.290.470,00	3.392.004,66	3.516.704,93	3.309.041,01
Subosukawonosraten	3.669.920,57	3.812.474,73	3.972.532,58	4.153.581,91	4.305.159,84	3.982.733,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa Kota Surakarta di setiap tahunnya masih tetap merupakan daerah dengan pendapatan terbesar dibandingkan daerah lain, yang disusul Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten

Sukoharjo, yaitu besarnya masing-masing rata-rata PDRB perkapita Rp 7.871.009,70; Rp 5.337.508,40; dan Rp 5.028.987,80. Berbeda dengan Kabupaten Wonogiri yang hanya mencapai Rp 2.225.974,76, dan berada pada posisi paling bawah di antara daerah-daerah di Subosukawonosraten.

2. Pengembangan Sektor Unggulan

a. PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha di Subosukawonosraten tahun 2004-2008

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah, yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Perhitungan dalam penelitian ini didasarkan atas dasar harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi dan dihitung menurut lapangan usaha yang terbagi menjadi sembilan sektor.

PDRB berdasarkan lapangan usaha yang diperoleh di masing-masing kabupaten/kota Subosukawonosraten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Surakarta Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	2.796,91	2.821,39	2.855,22	2.899,10	2.866,18
2. Sektor Pertambangan dan Galian	1.732,80	1.790,65	1.786,83	1.828,17	1.905,23
3. Sektor Industri Pengolahan	1.089.912,64	1.105.952,91	1.134.134,37	1.173.422,60	1.200.606,83
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	80.416,81	83.995,71	91.764,94	96.867,33	103.020,58
5. Sektor Bangunan	420.965,63	455.657,84	482.295,37	528.770,39	583.069,88
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	920.675,34	990.436,08	1.059.091,72	1.126.471,69	1.211.208,49
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	362.003,52	381.852,29	404.594,41	428.864,77	449.973,94
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	354.389,44	378.286,92	401.749,42	425.590,18	449.992,44
9. Sektor Jasa-Jasa	436.480,36	457.375,87	489.257,66	519.573,14	546.699,38
Jumlah	3.669.373,45	3.858.169,67	4.067.529,94	4.304.287,37	4.549.342,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 6 menjelaskan besarnya PDRB yang diterima Kota Surakarta selama tahun 2004-2008. Sektor yang paling banyak memberikan sumbangan terhadap pendapatan di Surakarta adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar Rp 1.211.208,49, kemudian menyusul sektor industri pengolahan

sebesar Rp 1.200.606,83 juta rupiah. Sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar Rp 1.905,23 yang merupakan capaian terendah dari sembilan sektor lainnya. Semua sektor mengalami kenaikan di setiap tahunnya, kecuali sektor pertanian yang menurun di tahun 2008 sebesar Rp 2.866,18 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.899,10.

Tabel 7. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Boyolali Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	1.214.789,23	1.270.600,78	1.290.672,18	1.305.830,80	1.328.683,03
2. Sektor Pertambangan dan Galian	24.579,14	25.863,89	30.698,74	34.309,70	35.458,14
3. Sektor Industri Pengolahan	561.287,89	563.954,90	582.759,03	609.253,24	638.447,91
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	30.910,72	33.795,69	42.784,23	46.644,08	50.808,09
5. Sektor Bangunan	80.143,55	84.927,59	92.569,24	104.995,69	107.703,66
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	863.855,67	897.510,19	917.695,40	940.415,44	971.814,68
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	87.592,17	91.433,79	99.627,12	101.148,51	105.867,36
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	220.071,18	222.845,57	230.414,00	238.020,01	250.737,19
9. Sektor Jasa-Jasa	237.836,81	265.456,40	314.005,26	367.484,66	409.852,80
Jumlah	3.321.066,35	3.456.388,80	3.601.225,20	3.748.102,11	3.899.372,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 7 menjelaskan PDRB yang diterima Kabupaten Boyolali selama tahun 2004-2008. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan Kabupaten Boyolali, yaitu Rp 1.328.683,03. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar Rp 971.814,68. Berbeda dengan sektor pertambangan dan galian yang menempati posisi terendah, yang hanya sebesar Rp 35.458,14.

Tabel 8. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Sukoharjo Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	757.823,02	802.838,94	832.383,24	876.494,86	920.118,11
2. Sektor Pertambangan dan Galian	33.198,58	33.839,31	34.265,69	34.974,08	35.355,30
3. Sektor Industri Pengolahan	1.162.044,50	1.202.242,45	1.248.116,20	1.303.210,93	1.359.291,24
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	36.532,38	37.066,23	39.245,30	44.464,42	46.449,85
5. Sektor Bangunan	147.012,09	157.679,83	171.472,99	181.345,44	190.859,79
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	1.057.987,10	1.100.398,76	1.148.044,09	1.206.521,86	1.263.767,82
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	161.747,79	169.798,34	178.961,47	189.071,35	198.992,58
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	127.049,88	131.413,30	137.199,26	146.162,74	156.912,96
9. Sektor Jasa-Jasa	302.817,38	306.511,30	330.749,11	348.747,22	369.003,89
Jumlah	3.786.212,72	3.941.788,46	4.120.437,35	4.330.992,90	4.540.751,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 8 merupakan rincian besarnya PDRB yang diterima Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun, mulai dari tahun 2004-2008. Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu Rp 1.359.291,24. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu Rp 1.263.767,82, sedangkan sektor pertambangan dan galian berada pada urutan terbawah, yaitu hanya sebesar Rp 35.355,30.

Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Karanganyar Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	781.354,14	824.366,11	858.106,43	905.914,29	988.203,75
2. Sektor Pertambangan dan Galian	34.522,62	36.011,64	37.296,16	38.519,48	39.547,95
3. Sektor Industri Pengolahan	2.065.453,01	2.201.053,32	2.320.100,58	2.460.944,82	2.533.118,36
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	54.407,48	57.717,54	61.677,76	64.416,42	66.863,21
5. Sektor Bangunan	96.938,80	101.794,26	106.244,46	111.684,18	116.419,59
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	416.747,71	432.760,22	451.040,34	469.806,10	506.353,94
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	116.591,45	120.994,51	125.699,88	130.215,96	135.392,91
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	84.475,90	89.626,25	94.453,55	98.632,69	102.673,88
9. Sektor Jasa-Jasa	319.787,82	324.006,65	346.592,57	373.920,56	402.881,12
Jumlah	2.770.435,78	4.188.330,50	4.401.301,74	4.654.054,50	4.921.454,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 9 menjelaskan gambaran penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2004-2008. Industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan pendapatan di Kabupaten Karanganyar, yaitu sebesar Rp 2.533.118,36, sedangkan penyumbang terkecil ada pada sektor pertambangan dan galian, yaitu Rp 39.547,95.

Tabel 10. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Wonogiri Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	1.191.544,80	1.244.649,07	1.298.375,40	1.354.884,00	1.403.678,95
2. Sektor Pertambangan dan Galian	19.147,42	20.246,02	21.263,50	22.130,14	23.162,39
3. Sektor Industri Pengolahan	103.068,04	107.776,65	117.307,12	123.303,55	129.129,18
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	14.131,04	14.456,84	14.916,74	15.534,45	16.086,93
5. Sektor Bangunan	88.815,46	95.087,13	102.189,08	108.821,47	116.797,09
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	306.364,06	320.939,62	332.912,13	346.830,61	362.751,73
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	227.398,98	230.265,59	233.573,99	247.581,03	259.154,42
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	102.579,89	107.261,62	110.805,97	116.335,01	118.019,98
9. Sektor Jasa-Jasa	276.409,37	289.187,09	297.507,83	321.648,63	341.655,12
Jumlah	2.329.459,06	2.429.869,63	2.528.851,78	2.657.068,89	2.770.435,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 10 menjelaskan besarnya peranan masing-masing sektor dalam menyumbang bagi penerimaan pendapatan di Kabupaten Wonogiri selama tahun 2004-2008. Penyumbang terbesar adalah sektor pertanian yaitu RP 1.403.678,95, sedangkan penyumbang terkecil ada pada sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp16.086,93.

Tabel 11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Sragen Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	803.047,00	837.968,07	863.187,15	897.211,12	928.234,66
2. Sektor Pertambangan dan Galian	6.461,75	7.008,18	7.164,46	7.708,15	8.129,57
3. Sektor Industri Pengolahan	473.230,44	500.203,79	532.376,56	568.751,31	607.878,47
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	24.881,41	26.541,67	30.064,88	30.604,21	32.771,10
5. Sektor Bangunan	96.407,45	101.376,40	107.818,54	114.952,29	122.801,11
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	396.565,23	417.946,95	441.797,67	469.628,61	499.984,78
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	74.008,55	76.267,06	80.022,12	84.395,85	89.570,45
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	86.288,89	90.321,83	96.199,03	102.729,88	109.230,85
9. Sektor Jasa-Jasa	247.403,68	264.605,48	283.940,02	306.511,06	330.849,33
Jumlah	2.208.294,40	2.322.239,43	2.442.570,43	2.582.492,48	2.729.450,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 11 menjelaskan tentang besarnya penerimaan PDRB yang dirinci tiap sektor di Kabupaten Sragen tahun 2004-2005. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar, yaitu Rp 928.234,66. Sektor pertambangan dan galian hanya sebesar Rp 8.129,57, yang merupakan angka terendah dalam peranannya bagi penerimaan daerah di Kabupaten Sragen.

Tabel 12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Klaten Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	898.771,87	918.295,98	943.060,85	957.297,31	997.737,70
2. Sektor Pertambangan dan Galian	38.020,95	45.641,61	53.338,31	55.826,27	60.923,17
3. Sektor Industri Pengolahan	855.226,78	896.705,60	841.653,96	869.903,33	891.041,98
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	25.869,72	26.760,65	27.849,31	30.423,64	31.940,66
5. Sektor Bangunan	293.239,59	318.018,30	365.824,54	398.079,88	404.620,11
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	1.083.938,75	1.140.169,48	1.191.778,73	1.230.415,46	1.273.346,68
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	104.199,89	109.166,14	113.985,64	119.386,12	126.571,71
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	156.029,23	162.220,04	148.969,69	156.907,22	166.933,94
9. Sektor Jasa-Jasa	520.496,09	541.227,36	567.326,97	576.448,79	614.085,01
Jumlah	3.975.792,87	4.158.205,16	4.253.788,00	4.394.688,02	4.567.200,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 12 merupakan penjelasan besarnya pendapatan daerah yang diterima Kabupaten Klaten selama tahun 2004-2008. Hampir setiap sektor mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya, kecuali untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang menurun pendapatannya di tahun 2006 yang hanya sebesar Rp 148.969,69 dibanding tahun sebelumnya mencapai Rp 162.220,04. Meskipun ditahun 2007 mengalami kenaikan, namun kenaikan PDRB belum sebesar yang diharapkan mengingat kenaikan ini masih dibawah angka yang telah dicapai pada tahun 2005, yaitu sebesar Rp 156.907,22. Sektor yang memberikan peranan tinggi pada penerimaan daerah adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, yaitu secara berurutan masing-masing sebesar Rp 1.273.346,68; Rp 997.737,70; dan Rp 891.041,98. Sektor gas, listrik dan air bersih merupakan sektor penyumbang terkecil, yaitu Rp 31.940,66.

Berdasarkan tabel PDRB di Subosukawonosraten tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir secara keseluruhan, PDRB mengalami kenaikan selama periode penelitian. Begitu juga dengan perkembangan tiap sektor selalu mengalami kenaikan, kecuali pada sektor pertanian yang menurun pada tahun 2008 dan sektor pertambangan dan galian yang menurun pada tahun 2006, namun itu tidak berpengaruh besar pada penerimaan total di Surakarta. Masing-masing daerah mempunyai sektor-sektor yang merupakan penyumbang terbesar bagi

penerimaan daerah, hal serupa juga terjadi pada sektor-sektor yang hanya sedikit berperan bagi pendapatan daerahnya, namun secara keseluruhan sektor dengan penyumbang terkecil ada pada sektor pertambangan dan galian, kecuali untuk Kabupaten Wonogiri dan Klaten yaitu sektor listrik, gas dan air bersih.

b. PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha Subosukawonosraten tahun 2004-2008

PDRB Subosukawonosraten digunakan sebagai daerah referensi untuk dibandingkan dengan wilayah dibawahnya, yaitu kabupaten dan kota. Berikut disajikan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha di Subosukawonosraten tahun 2004-2008.

Tabel 13. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Sektor Pertanian	5.650.126,97	5.901.540,34	6.088.640,47	6.300.531,48	6.569.522,38
2. Sektor Pertambangan dan Galian	157.663,26	170.401,30	185.813,69	195.295,99	204.481,75
3. Sektor Industri Pengolahan	6.310.223,30	6.577.889,62	6.776.447,82	7.108.789,78	7.389.513,97
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	267.149,56	280.334,33	308.303,16	328.954,55	347.940,42
5. Sektor Bangunan	1.223.522,57	1.314.541,35	1.428.414,22	1.548.649,34	1.642.271,23
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran	5.046.133,86	5.300.161,30	5.542.360,08	5.790.089,77	6.089.228,12
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	1.133.542,35	1.179.777,72	1.236.464,63	1.300.663,59	1.365.523,37
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.130.884,41	1.181.975,53	1.219.790,92	1.284.377,73	1.254.501,24
9. Sektor Jasa-Jasa	2.341.231,51	2.448.370,15	2.629.379,42	2.814.334,06	3.015.026,65
Jumlah	23.260.477,79	24.354.991,64	25.415.614,41	26.671.686,29	27.978.009,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa selalu ada kenaikan PDRB tiap tahunnya. Sektor-sektor yang memiliki peranan terbesar bagi pendapatan daerah adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran, secara berurutan besarnya adalah Rp 7.389.513,97; Rp 6.569.522,38; dan Rp 6.089.228,12. Adapun sektor penyumbang terkecil yaitu sektor pertambangan dan galian sebesar Rp 204.481,75. Penerimaan total Subosukawonosraten pada tahun 2008 sebesar Rp 27.978.009,13.

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan sebagai langkah dalam upaya untuk membuktikan pernyataan yang ada dalam perumusan hipotesis, yaitu diterima atau ditolak. Hipotesis akan diterima apabila fakta-fakta empiris yang telah dikumpulkan mampu mendukung pernyataan yang ada dalam hipotesis, sedangkan hipotesis akan ditolak apabila fakta empiris tidak mendukung pernyataan hipotesis.

1. Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Berikut merupakan tabel pengelompokan daerah berdasarkan *Klassen Typology*:

Tabel 14. Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen

Laju pertumbuhan (r) \ PDRB perkapita (Y)	$y_i > y$	$y_i < y$
	$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
$r_i < r$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Keterangan:

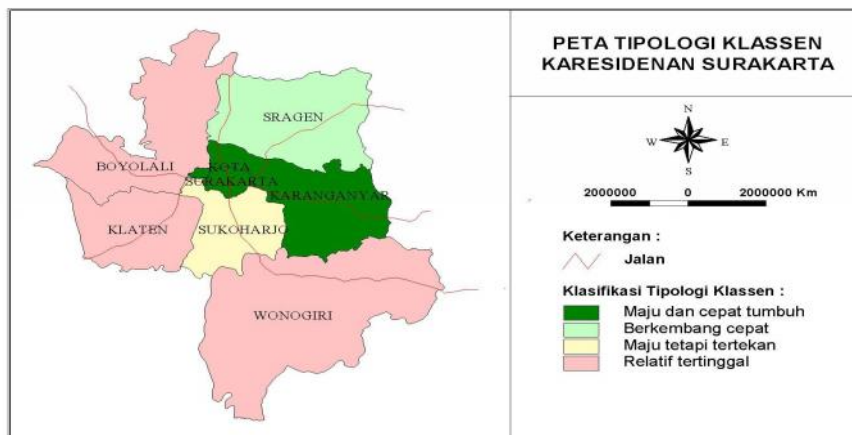
- r_i : rata-rata laju pertumbuhan kabupaten/kota yang diamati
- r : rata-rata laju pertumbuhan nasional (Subosukawonosraten)
- y_i : rata-rata PDRB perkapita kabupaten/kota yang diamati
- y : rata-rata PDRB perkapita nasional (Subosukawonosraten)

Struktur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klassen di Subosukawonosraten tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 15 dan Gambar 1.

Tabel 15. Struktur Pertumbuhan Ekonomi Menurut *Klassen Typology*

PDRB perkapita (Y) Laju pertumbuhan (r)	$y_i > y$	$y_i < y$
	$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh <ul style="list-style-type: none"> • Karanganyar • Surakarta
$r_i < r$	Daerah maju tetapi tertekan <ul style="list-style-type: none"> • Sukoharjo 	Daerah relatif tertinggal <ul style="list-style-type: none"> • Boyolali • Klaten • Wonogiri

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2004-2008 diolah



Gambar 2. Peta Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten menurut Tipologi Klassen tahun 2004-2008

Sumber: Tabel 15 diolah

Berdasarkan Tabel 15 dan Gambar 1 dapat diketahui bahwa terdapat pengelompokan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Subosukawonosraten tahun 2004-2008. Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

Kabupaten Sukoharjo menjadi satu-satunya kabupaten yang masuk ke dalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan. Sementara itu, Kabupaten Sragen juga menjadi satu-satunya daerah yang masuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Tiga daerah lainnya masuk ke dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat pengelompokan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Subosukawonosraten tahun 2004-2008.

2. Upaya Meningkatkan Sektor Unggulan

Sebelum mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor unggulan, maka perlu diketahui terlebih dahulu sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di tiap kabupaten di Subosukawonosraten.

Location Quotient (LQ) di tiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan:

LQ = Koefisien *Location Quotient*

E_{ij} = Variabel regional (pendapatan regional, *employment*, dsb) di sektor i di wilayah j

E_j = Variabel regional di wilayah j

E_{in} = Variabel regional di sektor i di perekonomian nasional sebagai perekonomian *benchmark*/patokan/acuan

E_n = Variabel regional di perekonomian nasional.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat diartikan ke dalam tiga kategori:

$LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut basis, yaitu sektor tersebut mempunyai prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan, karena mampu di alokasikan ke daerah lain.

$LQ = 1$ berarti semua permintaan akan output suatu sektor dipenuhi oleh sektor tersebut di daerah maupun didaerah himpunan.

LQ < 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut non basis dan kurang menguntungkan untuk dikembangkan serta belum mampu memenuhi semua permintaan dari dalam daerah sehingga harus mendatangkan dari daerah lain.

Contoh perhitungan *Location Quotient* pada sektor pertanian kota Surakarta tahun 2004:

$$LQ = \frac{2.796,91 / 3.669.373,45}{5.650.126,97 / 23.260.477,79} = 0.003$$

Perhitungan yang sama diberlakukan untuk sektor dan kabupaten/kota yang lain.

Berikut disampaikan hasil perhitungan *Location Quotient* di tiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten.

Tabel 16. Hasil Analisis LQ Kota Surakarta Tahun 2004-2008 (%)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
2.	Pertambangan & Galian	0,069	0,066	0,060	0,058	0,057
3.	Industri Pengolahan	1,095*	1,061*	1,046*	1,023*	0,999
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	1,908*	1,891*	1,859*	1,825*	1,821*
5.	Bangunan	2,181*	2,188*	2,109*	2,116*	2,184*
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,157*	1,179*	1,194*	1,206*	1,223*
7.	Pengangkutan & Komunikasi	2,024*	2,043*	2,044*	2,043*	2,027*
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,987*	2,020*	2,058*	2,053*	2,043*
9.	Jasa-Jasa	1,182*	1,179*	1,162*	1,144*	1,115*

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). Keterangan: * Sektor Basis

Tabel 17. Hasil Analisis LQ Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2008 (%)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	1,506*	1,517*	1,496*	1,475*	1,451*
2.	Pertambangan & Galian	1,092*	1,069*	1,166*	1,250*	1,244*
3.	Industri Pengolahan	0,623	0,604	0,607	0,609	0,619
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,810	0,849	0,979	1,009*	1,048*
5.	Bangunan	0,459	0,455	0,457	0,482	0,471
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,199*	1,193*	1,169*	1,156*	1,145*
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,541	0,546	0,569	0,553	0,556
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,363*	1,328*	1,333*	1,319*	1,328*
9.	Jasa-Jasa	0,713	0,764	0,843	0,929	0,975

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). Keterangan: * Sektor Basis

Tabel 18. Hasil Analisis LQ Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004-2008 (%)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	0,824	0,841	0,843	0,857	0,863
2.	Pertambangan & Galian	1,294*	1,227*	1,137*	1,103*	1,065*
3.	Industri Pengolahan	1,131*	1,129*	1,136*	1,129*	1,133*
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,840	0,817	0,785	0,832	0,823
5.	Bangunan	0,738	0,741	0,740	0,721	0,716
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,288*	1,283*	1,278*	1,283*	1,279*
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,877	0,889	0,893	0,895	0,899
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,690	0,687	0,694	0,701	0,714
9.	Jasa-Jasa	0,795	0,774	0,776	0,763	0,754

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). Keterangan: * Sektor Basis

Tabel 19. Hasil Analisis LQ Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008 (%)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	0,810	0,812	0,814	0,824	0,855
2.	Pertambangan & Galian	1,283*	1,229*	1,159*	1,130*	1,099*
3.	Industri Pengolahan	1,918*	1,946*	1,977*	1,983*	1,949*
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	1,193*	1,197*	1,155*	1,122*	1,092*
5.	Bangunan	0,464	0,450	0,429	0,413	0,403
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	0,484	0,475	0,469	0,464	0,473
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,603	0,596	0,587	0,574	0,564
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,438	0,441	0,447	0,441	0,431
9.	Jasa-Jasa	0,800	0,769	0,761	0,761	0,759

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). Keterangan: * Sektor Basis

Tabel 20. Hasil Analisis LQ Kabupaten Wonogiri Tahun 2004-2008 (%)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	2,013*	2,114*	2,143*	2,159*	2,158*
2.	Pertambangan & Galian	1,159*	1,191*	1,150*	1,137*	1,144*
3.	Industri Pengolahan	0,156	0,164	0,174	0,174	0,176
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,505	0,517	0,486	0,474	0,467
5.	Bangunan	0,693	0,725	0,719	0,705	0,718
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	0,580	0,607	0,604	0,601	0,602
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1,915*	1,956*	1,899*	1,911*	1,917*
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,866	0,910	0,913	0,909	0,880
9.	Jasa-Jasa	1,127*	1,184*	1,137*	1,147*	1,144*

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). Keterangan: * Sektor Basis

Tabel 21. Hasil Analisis LQ Kabupaten Sragen Tahun 2004-2008 (%)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	1,497*	1,489*	1,475*	1,471*	1,448*
2.	Pertambangan & Galian	0,432	0,431	0,401	0,408	0,408
3.	Industri Pengolahan	0,790	0,798	0,817	0,826	0,843
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,981	0,993	1,015*	0,961	0,965
5.	Bangunan	0,830	0,809	0,785	0,767	0,766
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	0,828	0,827	0,829	0,838	0,842
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,049	0,678	0,673	0,670	0,672
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,804	0,801	0,821	0,826	0,827
9.	Jasa-Jasa	1,113*	1,133*	1,124*	1,125*	1,125*

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). Keterangan: * Sektor Basis

Tabel 22. Hasil Analisis LQ Kabupaten Klaten Tahun 2004-2008 (%)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	0,931	0,911	0,925	0,922	0,930
2.	Pertambangan & Galian	1,411*	1,569*	1,715*	1,735*	1,825*
3.	Industri Pengolahan	0,793	0,798	0,742	0,743	0,739
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,567	0,559	0,540	0,561	0,562
5.	Bangunan	1,402*	1,417*	1,530*	1,560*	1,509*
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,257*	1,260*	1,285*	1,290*	1,281*
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,049	0,542	0,551	0,557	0,568
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,807	0,804	0,730	0,741	0,755
9.	Jasa-Jasa	1,301*	1,295*	1,289*	1,243*	1,248*

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah). Keterangan: * Sektor Basis

Setiap kabupaten/kota di Subosukawonosraten mempunyai sektor-sektor yang diunggulkan yang berbeda-beda. Ada kabupaten/kota yang mampu mempertahankan sektor unggulan di tiap tahunnya, seperti Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten. Hal tersebut menunjukkan keadaan ekonomi yang cukup stabil selama rentang pengamatan penelitian. Adapula sektor-sektor yang pada awalnya merupakan sektor unggulan, tetapi ditahun-tahun berikutnya tidak lagi. Begitu pula sebaliknya, ada sektor non basis yang kemudian berkembang dan menjadi sektor unggulan di daerah tersebut. Tiga kabupaten yang sektor unggulannya berubah-ubah selama tahun 2004-2008, yaitu Surakarta, Boyolali, dan Sragen. Hal ini menunjukkan perekonomian di daerah tersebut cukup fluktuatif. Apabila dilihat secara keseluruhan, perekonomian di wilayah Subosukawonosraten cukup baik.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan Analisis *Klassen Typology* dan Analisis *Location Quotient*, maka dapat diberikan pembahasan sebagai berikut:

1. Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dapat diketahui struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Subosukawonosraten. Tiga kabupaten yang tergolong daerah relatif tertinggal (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri) berada di pinggir mengitari daerah-daerah yang menjadi pusat terjadinya kegiatan ekonomi khususnya perdagangan, yaitu Kota Surakarta; dan Kabupaten Karanganyar yang merupakan pusat industri. Kedua daerah tersebut, dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah di Subosukawonosraten karena dengan kegiatan utamanya sebagai pusat perdagangan dan industri mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sekitarnya yaitu dengan menampung hasil produksi daerah sekitarnya untuk diperdagangkan serta menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan kriteria Tipologi Klasen (Mudrajad Kuncoro, 2003: 101), Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu kedua daerah ini mempunyai pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sepanjang periode penelitian dibandingkan rata-rata di tingkat daerah referensinya (Subosukawonosraten). Kota Surakarta menjadi daerah terkaya dengan rata-rata pendapatan perkapita Rp 7.871.009,70 dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 5,58%, merupakan pusat kegiatan ekonomi di antara daerah-daerah di Subosukawonosraten yang juga tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD). Padahal jika dilihat dari luas wilayahnya, Surakarta merupakan daerah terkecil dari kabupaten-kabupaten lain. Perekonomian Kota Surakarta sudah tidak lagi di dominasi oleh sektor-sektor primer (sektor pertanian), melainkan oleh sektor sekunder dan sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa). Sektor-sektor sekunder maupun tersier tersebut menjadi kegiatan yang sangat penting dengan memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan daerah. Kota Surakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi daerah sekitarnya, mampu menampung hasil-hasil industri maupun pertanian bagi daerah sekitarnya, bahkan sudah ada pemusatan kegiatan perdagangan yaitu berupa pasar-pasar tradisional maupun pasar modern, yaitu pasar klewer, pasar gede, Pusat Grosir Solo (PGS), Solo Grand Mall (SGM), Solo Square, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, menurunnya lahan pertanian menjadikan Kota Surakarta mulai berada di masa transisi ke sektor industri sebagai kegiatan utama daerah tersebut.

Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten dengan rata-rata pendapatan perkapita sebesar Rp 5.337.508,40 dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% lebih tinggi dari Kota Surakarta. Industri pengolahan menjadi kegiatan utama di Kabupaten Karanganyar, tata letak kota yang sudah cukup tertata rapi dengan adanya pemusatan kegiatan industri, bahkan sebagai penyumbang hampir separuh dari pendapatan di Kabupaten Karanganyar.

Mudrajad Kuncoro (2003: 101) menyebutkan bahwa dalam *Klassen Typology* kriteria dari daerah maju tapi tertekan adalah daerah dengan pendapatan perkapita lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata Subosukawonosraten. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mencapai 4,58%, sedangkan pendapatan perkapitanya adalah Rp 5.028.987,80 yaitu melebihi rata-rata pendapatan perkapita di Subosukawonosraten. Rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tertekannya kegiatan utama dari Kabupaten Sukoharjo, yaitu pertanian dan perindustrian. Dilihat dari segi pertanian, masalah terjadi karena belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam serta lemahnya kelembagaan petani dan organisasi di pedesaan. Kabupaten Sukoharjo masih berusaha mempertahankan *trend mark* (ciri khas) daerah sebagai lumbung padi karena mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah bahkan juga menerima permintaan beras yang datang dari luar daerah. Sementara itu, dari segi industri adalah pada lemahnya manajemen usaha, kualitas produk yang masih rendah dan terbatasnya modal usaha. Pada dasarnya, permasalahan tersebut bukan merupakan masalah baru yang harus dihadapi Kabupaten Sukoharjo, namun hal tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian di daerah setempat, oleh sebab itu perlu segera adanya pemecahan masalah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tertekan.

Mudrajad Kuncoro (2003: 101) berpendapat bahwa daerah berkembang cepat pada Tipologi *Klassen* merupakan daerah yang mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Subosukawonosraten, meskipun rata-rata pendapatan perkapitanya lebih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Sragen mempunyai rata-rata pendapatan perkapita Rp 2.852.108,92 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,34%, yang berarti kabupaten ini masuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Kontribusi terbesar ada pada sektor pertanian yang mencapai 35%, meskipun pertumbuhannya melambat selama periode penelitian, sedangkan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tiap tahunnya. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa Kabupaten Sragen sedang terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor

industri. Banyaknya potensi-potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Sragen, dapat mendatangkan investor-investor dalam upaya pengembangan daerahnya, misalnya pengembangan beras organik yang tiap tahun permintaannya semakin meningkat seiring dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Selain dari pada itu, ada juga pengembangan tanaman buah, pengembangan zona industri Kalijambe, dan pengembangan batik yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tiga kabupaten terakhir adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri yang tergolong daerah relatif tertinggal, yaitu menurut Mudrajad Kuncoro (2003: 101) merupakan daerah yang mempunyai pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pada di Subosukawonosraten. Kabupaten-kabupaten tersebut mempunyai wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan kabupaten/kota daerah lain, namun belum ada pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal, bisa dilihat dari wilayahnya yang sebagian besar digunakan sebagai lahan sawah sehingga perekonomian pun hanya berpusat pada sektor pertanian saja. Daerah yang hanya mengandalkan pertaniannya saja akan sulit untuk berkembang, mengingat situasi harga barang-barang pertanian di pasaran internasional kurang menguntungkan, berakibat pada kelebihan produksi dan penurunan harga. Selain daripada itu, jika produksi pertaniannya lambat akan meningkatkan harga pangan, berakibat pada kenaikan upah dan pada akhirnya akan menghambat perindustrian daerah tersebut.

Kabupaten Boyolali yang tercatat mempunyai rata-rata pendapatan perkapita Rp 3.823.602,05 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 3,96% merupakan kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penyumbang utama perekonomian daerah, terutama subsektor bahan makanan serta subsektor peternakan dan hasil-hasilnya. Kabupaten Boyolali sangat menjaga apa yang menjadi ciri khas daerah mereka yaitu berupa penghasil susu segar dan juga daging sapi yang mampu mensuplai daerahnya sendiri bahkan sampai ke luar daerah. Permasalahan terjadi pada lemahnya infrastruktur sektor pertanian, akses pasar, dan permodalan, sehingga menjadi penghalang dalam mencapai pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang di harapkan.

Kabupaten lain yang termasuk daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Wonogiri. Kabupaten yang mempunyai rata-rata pendapatan perkapita Rp 2.225.974,76 dan rata-rata pertumbuhan 4,36% ini didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 50% dalam pembentukan PDRB daerah Wonogiri. Masih belum teratasinya masalah OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang berakibat menurunkan kualitas produk bahkan mengancam terjadinya gagal panen.

Kabupaten Klaten yang mempunyai rata-rata pendapatan perkapita Rp 3,309,041.01 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 3,79%, seperti ketiga kabupaten lainnya juga sama-sama mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomiannya, terutama subsektor tanaman bahan makanan. Hal ini ditunjang dengan sumberdaya alam berupa lahan sawah yang subur. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian menyebabkan lahan pertanian berkurang dari tahun ke tahun.

2. Pengembangan Sektor Unggulan

Terdapat perbedaan dalam menentukan sektor-sektor yang akan dijadikan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah dengan teori teknik perencanaan regional yang penulis sajikan. Penulis mendasarkan penentuan sektor unggulan dengan analisis *Location Quotient*, dengan alasan mampu menggambarkan kondisi umum daerah yaitu mengetahui potensi utama ekonomi daerah secara sektoral bahkan ke tingkat komoditi, selain itu juga dapat diketahui tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi daerah tersebut.

Berbeda dengan pemerintah daerah yang menentukan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun sebelumnya, yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah, kondisi geografis, potensi sumberdaya alam serta kondisi keuangan daerah tersebut. Penetapan prioritas pembangunan ditentukan menurut bidang, berbeda dari yang peneliti lakukan, yaitu secara sektoral. Meskipun demikian, pada dasarnya bidang maupun sektor prioritas merupakan sektor yang mendapat perhatian lebih dibandingkan sektor lain dalam rangka efisiensi sebagai upaya

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Suatu sektor dikatakan sebagai sektor unggulan atau sektor basis jika hasil perhitungan *Location Quotient* menunjukkan lebih dari satu (Lincoln Arsyad, 2009: 141). Adapun sektor unggulan yang dimaksud adalah jika sektor tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Rahardjo Adisasmita, 2005: 127):

- a. Sektor yang menghasilkan produksi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah (PDRB)
- b. Sektor yang memberikan lapangan kerja yang besar, sehingga menciptakan pendapatan bagi masyarakat
- c. Sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan yang kuat bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya
- d. Sektor yang menghasilkan ekspor non migas (menghasilkan devisa)
- e. Sektor yang pada saat sekarang memberikan kontribusi yang kecil, tetapi mempunyai potensi yang menjanjikan di masa yang akan datang

Berikut merupakan penjelasan mengenai sektor unggulan masing-masing daerah di Subosukawonosraten dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sektor unggulan tersebut:

a. Kota Surakarta

Sektor unggulan di Surakarta selama periode penelitian tidak mengalami perubahan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sektor unggulan di Kota Surakarta tahun 2004-2008:

1) Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surakarta, bahwa investasi selama empat tahun (tahun 2001 sampai dengan tahun 2004), menggambarkan trend pertumbuhan investasi utama yaitu sektor industri dan perdagangan di Kota Surakarta sangat baik yaitu rata-rata meningkat 50,28 % pertahun. Kota Surakarta merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi produk maupun budaya meraka sendiri, yang juga menjadi salah satu daya tarik para investor untuk menanamkan modal mereka di Kota Surakarta. Kontribusi sektor ini menyumbang sebesar lebih dari 20%, menjadikannya sebagai sektor unggulan Kota Surakarta, selain itu

ciri ekonomi kekotaan yang melekat pada Kota Surakarta menjadikan sektor industri pengolahan menjadi salah satu kegiatan yang mendominasi perekonomian di daerah tersebut.

Belum ada kebijakan pembangunan ekonomi yang mengatur khusus mengenai sektor ini. Kebijakan lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas karakteristik masyarakat Kota Surakarta agar lebih mencintai produk serta budaya yang sudah menjadi jiwa masyarakat sebagai modal awal pembangunan.

2) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Kota Surakarta merupakan daerah urban, dimana semua kegiatan ekonomi berpusat di kota ini. Alasan inilah yang membuat potensi sumberdaya alam semakin terbatas. Hanya air bawah tanah yang masih bisa diandalkan walaupun relatif kecil. Meskipun demikian, sektor ini menjadi penting setelah diberlakukannya otonomi daerah, kecuali untuk listrik dan gas yang pengelolaannya langsung dari pemerintah pusat. Sektor tersebut hanya menyumbang 2,27% bagi PDRB Surakarta, tetapi perlu disadari bahwa sektor ini sangat berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, misalnya dalam bidang industri maupun digunakan oleh seluruh masyarakat.

Belum ada kebijakan khusus mengenai sektor listrik, gas dan air bersih. Namun, bukan berarti tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kelestariannya, khususnya ketersediaan air bersih. Kebijakan yang berkaitan dengan sektor ini di arahkan untuk dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

3) Sektor Bangunan

Karakteristik dari kota urban adalah sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah dan pelayanan sosial, oleh karena itu sudah sewajarnya menjadi sektor unggulan mengingat banyaknya bangunan pemerintahan. Selain dari pada itu, pembangunan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Belum ada kebijakan khusus dari pemerintah dalam upayanya meningkatkan sektor bangunan.

4) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Ciri lain dari kota urban adalah karena kegiatan utamanya tidak lagi pada sektor primer (sektor pertanian). Persediaan hasil bumi seperti tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan dipasok dari wilayah-wilayah disekitarnya, selain itu hasil dari sektor industri pengolahan selain diekspor ke luar daerah juga di konsumsi sendiri. Hal inilah yang menjadikan Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan di Subosukawonosraten. Hasil dari perdagangan mampu menyumbang 26% bagi pendapatan kota Surakarta.

Terdapat pemusatan daerah-daerah pemasaran untuk barang-barang hasil industri maupun pertanian, dimulai dari pasar tradisional sampai pasar modern. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap sektor-sektor lain secara tidak langsung, misalnya sektor pengangkutan dan komunikasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Kebijakan untuk meningkatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu disinggung pada prioritas pembangunan Kota Surakarta pada upaya peningkatan investasi dan ekspor non migas. Kebijakan di arahkan untuk peningkatan sarana pembiayaan perdagangan dan memperkuat kelembagaan pengamanan perdagangan internasional.

5) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Daerah dengan jumlah penduduk yang cukup padat sangat membutuhkan kenyamanan dalam hal pengangkutan dan komunikasi. Semua itu demi kelancaran kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, terutama bagi yang tinggal di daerah yang menjadi sentral kegiatan ekonomi. Tidak mengherankan jika sektor ini menyumbangkan sebesar 10%, merupakan angka yang cukup besar dalam peranannya pada pendapatan Kota Surakarta.

Kebijakan untuk meningkatkan sektor ini, diungkapkan pada prioritas pembangunan peningkatan kualitas infrastruktur. Kebijakan di arahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa kebutuhan akan informasi serta dengan pembangunan-pembangunan pada transportasi darat.

6) Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor ini sangat berperan besar dalam menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi, baik sektor primer, sekunder maupun tersier. Berkembang tidaknya sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan akan berbanding lurus dengan kegiatan ekonomi di Kota Surakarta. Kota yang menjadi pusat perdagangan ini, akan memerlukan lembaga keuangan untuk melancarkan kegiatan ekonominya, sehingga sektor ini mampu menjadi sektor andalan di Kota Surakarta dengan menyumbang sebesar 10% kepada pendapatan daerah. Namun, sayangnya belum ada kebijakan khusus yang mengatur sektor tersebut.

7) Sektor Jasa-Jasa

Sektor sekunder dan tersier mempunyai peran sangat besar dalam memberikan pendapatan bagi Kota Surakarta. Apalagi Kota Surakarta mempunyai ciri ekonomi kekotaan dengan didominasi oleh perdagangan, pelayanan jasa, dan hiburan. Wilayah sekitarpun bergantung pada pelayanan jasa yang ditawarkan guna menggerakkan roda perekonomian mereka. Hal ini cukup menjelaskan, bahwa sektor ini cukup bisa menjadi andalan bagi Kota Surakarta di masa mendatang. Kontribusi sektor ini mencapai 12% bagi pendapatan daerah di tahun 2008.

Berikut merupakan kebijakan berkaitan dengan meningkatkan sektor jasa-jasa, yaitu:

a) Subsektor pemerintahan umum

Berikut merupakan kebijakan dalam pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan di arahkan untuk:

- (1) Mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan bagian (belanja aparatur daerah dan belanja publik) dan jenis belanja (belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan belanja modal)
- (2) Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

- (3) Menyusun anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk maju dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
 - (4) Menyusun anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah
- b) Subsektor swasta

Kebijakan yang berkaitan dengan jasa pendidikan di arahkan pada meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, kebijakan juga di arahkan pada meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai oleh:

- (1) Meningkatnya proporsi pendidikan formal dan non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar
- (2) Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar dan
- (3) Meningkatnya hasil penelitian pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat

Kebijakan dalam jasa sosial kemasyarakatan di arahkan untuk, yaitu:

- (1) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial (PMKS)
- (2) Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
- (3) Tersusunnya sistem perlindungan sosial
- (4) Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial

commit to user

(5) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial

(6) Terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial

Kebijakan dalam hal kesehatan di arahkan pada meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kebijakan lain di arahkan dalam hal pariwisata, yaitu untuk meningkatkan efisiensi promosi dan pengembangan produk wisata dan meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

b. Kabupaten Boyolali

Berikut merupakan penjelasan masing-masing sektor unggulan di Kabupaten Boyolali tahun 2004-2008:

1) Sektor Pertanian

Lahan sawah yang luas menjadikan sektor pertanian mampu menjadi sektor unggulan di Boyolali, selain itu ciri khas dari daerah ini ada pada peternakan dan hasil-hasilnya, terutama pada konsumsi daging dan susu yang mampu menopang kebutuhan masyarakat dalam daerah maupun luar daerah. Sektor ini mampu menyumbang sebesar 35% bagi pendapatan daerah Boyolali. Pengelolaan yang baik dengan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan dan bantuan modal, serta dengan pembentukan KUD, mampu meningkatkan produksi peternakan lebih maksimal dan terarah. Masa depan sektor ini akan semakin baik, apalagi ditunjang dengan permintaan masyarakat akan daging dan susu yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibedakan ke dalam beberapa urusan yang menangani sektor pertanian, yaitu: Pertama urusan pertanian. Kebijakan di arahkan untuk, yaitu:

a) Meningkatkan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan menguatkan lembaga pendukungnya yang dilakukan melalui penyusunan kebijakan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak serta menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk

meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif, membangun sistem pengiriman dengan dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani

- b) Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis
- c) Menguatkan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri
- d) Menjaga fungsi lahan untuk sawah lestari agar tidak digunakan pada fungsi yang lain

Kedua adalah urusan perikanan. Kebijakan di arahkan untuk, yaitu:

- a) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani pembudidaya ikan
- b) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya, peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi paska tangkap/panen, peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan
- c) Mengembangkan usaha budidaya ikan dengan konsep pengembangan agribisnis
- d) Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk perikanan, misalnya dorongan untuk peningkatan paska panen dan pengolahan hasil perikanan, sistem standar mutu dan keamanan pangan

Ketiga adalah urusan kehutanan. Kebijakan di arahkan untuk, yaitu:

- a) Mewujudkan perbaikan sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya
- b) Meningkatkan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu
- c) Meningkatkan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman, dan meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

2) Sektor Pertambangan dan Galian

Kabupaten Boyolali mempunyai potensi bahan tambang yang cukup banyak, terutama sumberdaya mineral. Adapun pertambangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar, bukan hanya bagi pendapatan daerah saja tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja, seperti penambangan galian C (pasir, pasir batu dan tanah urug). Potensi bahan tambang lain yang terdapat di Kabupaten Boyolali adalah bentonit, batu gamping, pasir dan batu serta tanah lempung.

Kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan galian diarahkan kepada pemeliharaan lingkungan hidup, yaitu berupa meningkatkan dan mengupayakan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam. Kebijakan lain yang berkaitan langsung dengan sektor tersebut, yaitu diarahkan kepada:

- a) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, termasuk regulasi dan penegakan peraturan perundangan serta penyidikan bagi pelanggarannya
- b) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan rakyat yang berpotensi untuk merusak lingkungan, terutama penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (Peti), penyebaran peta rawan bencana alam dan pengendalian eksploitasi air bawah tanah.

3) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Perkembangan jelas terlihat pada pelayanan listrik yang semakin baik, karena sudah mampu menjangkau daerah-daerah terpencil di Boyolali oleh Pelayanan Listrik Negara (PLN). Sektor ini akan semakin baik perkembangannya karena Kabupaten Boyolali mempunyai waduk yang dimanfaatkan sebagai selain pariwisata juga sebagai pembangkit listrik. Curah hujan di Kabupaten Boyolali yang cukup tinggi menjadikan sumber air bersih tersedia cukup banyak. Hanya orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan yang sudah bisa menikmati layanan air minum dari PDAM, sedangkan warga yang tinggal di wilayah pedesaan menggunakan air tanah yang kondisinya masih bersih belum tercemar oleh limbah. Meskipun sektor ini hanya

menyumbang sebesar 1% bagi pendapatan daerah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sektor ini menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat juga bagi sektor industri. Bertambahnya penduduk menjadikan sektor ini makin besar peranannya, oleh karena itu sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar di masa yang akan datang.

Kebijakan untuk meningkatkan sektor listrik gas dan air bersih terdapat pada urusan energi dan sumberdaya mineral. Kebijakan di arahkan untuk pengendalian eksploitasi air bawah tanah; dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, termasuk peningkatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor usaha di wilayah terpencil dan penyusunan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten Boyolali.

Kebijakan sektor ini juga terdapat pada urusan pekerjaan umum. Kebijakan di arahkan untuk, yaitu:

- a) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air, baik air tanah, mata air, sungai, waduk dan air hujan secara bijaksana untuk kepentingan yang domestik, pertanian maupun industri
 - b) Meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih/ air minum pada warga masyarakat terutama pada daerah/ wilayah yang mengalami kesulitan air bersih karena kondisi lingkungan dan sumberdaya alam yang tidak mendukung
 - c) Meningkatkan kapasitas penanganan limbah cair terutama yang bersumber dari industri agar tidak mencemari badan air (lingkungan)
 - d) Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya
 - e) Mengembangkan dan melakukan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- 4) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah pertanian, sehingga untuk kedepannya sektor ini diharapkan tetap mampu menjadi sektor basis. Hasil pertanian dan peternakan yang cukup banyak

merupakan dasar mengapa sektor perdagangan menjadi sektor yang diunggulkan. Semakin banyak permintaan yang datang, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh dari sektor perdagangan.

Upaya peningkatan pada sektor ini ada pada prioritas pembangunan perdagangan. Kebijakan di arahkan untuk, yaitu:

- a) Mengembangkan dan meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen, dengan mendorong pengusaha untuk memiliki Surat Ijin Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)
 - b) Mewujudkan penguatan institusi pendukung pasar, melalui penertiban kemetrologian UTTP
 - c) Meningkatkan kelancaran sistem distribusi dan perdagangan, melalui penyediaan sarana dan prasarana perdagangan
 - d) Mendorong kepada para pelaku usaha industri dan perdagangan untuk menerapkan standarisasi produk industri manufaktur
 - e) Mendorong peningkatan akses jaringan informasi serta akses pasar produk-produk hasil industri manufaktur baik di dalam maupun di luar negeri
 - f) Meningkatkan kerjasama dan penyediaan informasi pasar
 - g) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perdagangan
 - h) Meningkatkan efisiensi dalam perdagangan, seperti penyediaan pasar lelang daerah ataupun penyelenggaraan pameran produk lokal
 - i) Meningkatkan kinerja ekspor melalui pengurangan biaya ekonomi, membuka pasar baru, meningkatkan diversifikasi ekspor, meningkatkan penyediaan infrastruktur
 - j) Meningkatkan pembinaan pada pedagang kaki lima dan asongan
- 5) Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor perdagangan akan selalu terkait dengan sektor keuangan. Kabupaten Boyolali yang berkhaskan hasil ternak membutuhkan koperasi sebagai pengumpul, sehingga mempermudah pemasaran, serta kendali mutu akan lebih terjamin. Sementara itu, upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan UKM sangat tergantung pada bantuan permodalan yang

membutuhkan lembaga keuangan dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, Koperasi maupun UKM mampu mengembangkan usahanya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan jumlah koperasi dan UKM dapat dikatakan karena adanya andil yang besar dari jasa lembaga keuangan yang mau memberikan kredit sebagai permodalan. Hal tersebut menjadikan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mampu menjadi sektor unggulan untuk masa-masa yang akan datang.

Tidak ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan peningkatan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Hal ini sangat disayangkan mengingat peran dari sektor ini yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Boyolali, khususnya pada sektor perdagangan.

c. Kabupaten Sukoharjo

Berikut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sukoharjo:

1) Sektor Pertambangan dan Galian

Kontribusi sektor pertambangan dan galian bagi pendapatan daerah mencapai tidak lebih dari 1%, namun angka ini cukup menjadikannya sebagai sektor unggulan karena mampu memasok bagi daerah-daerah khususnya wilayah dalam BKAD Subosukawonosraten. Kebijakan untuk meningkatkan sektor tersebut di arahkan kepada:

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup
- b) Pengembangan sistem informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup
- c) Pengoptimalan kegiatan pertambangan
- d) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup

2) Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan ditetapkan sebagai andalan pembangunan dan ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan daerah Sukoharjo. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 30% bagi pendapatan daerah. Produk-produk hasil industri di Kabupaten Sukoharjo sudah banyak yang

diekspor ke luar daerah bahkan ke luar negeri, berarti kualitas produk yang dihasilkan cukup baik untuk bersaing dengan produk-produk impor. Berikut merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Sukoharjo, yaitu komoditi mebel kayu, mebel rotan, kerajinan gamelan, emping melinjo, tekstil, kerajinan ukir kaca, kerajinan tatah sungging/ kulit, kerajinan gitar, bola bulu tangkis, dan jamu tradisional. Kebijakan dalam upaya meningkatkan sektor industri pengolahan di arahkan kepada:

- a) Pemberdayaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan
 - b) Peningkatan industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan berorientasi ekspor
 - c) Pengembangan sentra industri dan produk unggulan daerah
- 3) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Berdasarkan hasil analisis LQ, dapat diketahui bahwa sektor industri di Kabupaten Sukoharjo merupakan sektor potensial dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,95. Hal tersebut membuktikan bahwa ada potensi yang besar yang bisa dikembangkan pada sektor industri. Sektor perdagangan dan sektor industri merupakan dua hal yang saling menunjang satu sama lain. Alasan mengapa sektor perdagangan menjadi sektor basis adalah karena Kabupaten Sukoharjo mempunyai komoditi unggulan yang cukup bersaing baik di dalam daerah maupun luar daerah/luar negeri, terutama hasil industri pengolahannya. Sektor ini mampu menyumbang sebesar 27% bagi pendapatan daerahnya.

Berikut merupakan kebijakan dalam upaya meningkatkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, yaitu di arahkan untuk:

- a) Pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
- b) Peningkatan tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- c) Peningkatan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat

d. Kabupaten Karanganyar

Berikut merupakan penjelasan masing-masing sektor basis di Kabupaten Karanganyar:

1) Sektor Pertambangan dan Galian

Lain halnya dengan sektor petambangan dan galian yang perkembangan nilai LQ-nya selalu menurun selama tahun penelitian. Hanya pada tahun 2004, sektor ini menjadi sektor basis bagi Kabupaten Karanganyar. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh sumberdaya pertambangan di Kabupaten Karanganyar merupakan pertambangan informal yang justru merusak lingkungan, apalagi belum adanya pengawasan yang efektif dari pihak pemerintah.

2) Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah, yaitu mencapai 52%. Kabupaten Karanganyar sudah ada penetapan daerah industri, dengan pengelolaan yang baik maka tidak akan mencemari lingkungan. Subsektor penyumbang terbesar ada pada industri tekstil, barang kulit dan alas kaki.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan sektor basis kaitannya dengan koperasi dan usaha kecil menengah adalah di arahkan untuk mengembangkan sistem pendukung usaha bagi UKM serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.

Kebijakan lain yang berkaitan dengan penanaman modal adalah: Untuk menguatkan dan mengembangkan permodalan dan jaringan kemitraan usaha KSP-USP Koperasi; Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi daerah; dan meningkatkan iklim investasi dan realisasi penanaman modal daerah.

Kebijakan yang langsung berkaitan dengan sektor industri adalah di arahkan untuk mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis sumberdaya lokal; mengembangkan sentra industri potensial; melakukan penataan struktur industri; meningkatkan kemampuan teknologi industri; meningkatkan SDM, dan pelatihan dan bantuan peralatan produksi industri.

3) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Kabupaten Karanganyar mempunyai banyak sekali sumber air berupa mata air karena letaknya di kaki Gunung Lawu. Semakin ke barat akan lebih banyak ditemukan sumber mata air yang berasal dari Gunung Lawu. Pemanfaatan sumber air bersih dilakukan oleh PDAM yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Kebijakan dalam sektor ini di arahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana air bersih di wilayah pedesaan dan mengembangkan ketenagalistrikan dan migas.

e. Kabupaten Wonogiri

Berikut merupakan penjelasan masing-masing sektor unggulan di Kabupaten Wonogiri tahun 2004-2008:

1) Sektor Pertanian

Sektor pertanian menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan sektor pertanian yang mencapai 50%, khususnya pada subsektor tanaman bahan makanan. Meskipun telah menjadi sektor basis, namun pengembangan sektor pertanian ini belum pada tahap maksimal. Masih ada hambatan-hambatan yang masih belum bisa ditangani dengan optimal, misalnya belum adanya pemerataan penggunaan bibit unggul oleh petani, adanya serangan organisme pengganggu tanaman, dan masih tergantungnya lahan pada saluran irigasi yang masih sangat sederhana. Hal ini menyebabkan produksi hasil pertanian berkurang, dan hilangnya pendapatan daerah. Penanganan yang tepat, diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian, sehingga untuk masa yang akan datang tetap mampu menjadi sektor unggulan.

Kebijakan disusun berdasarkan penjabaran visi dan misi yang diangkat Kabupaten Wonogiri. Kebijakan untuk meningkatkan sektor pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan dan pembudidaya ikan

- b) Penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun sistem pengiriman dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan
- c) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian
- d) Peningkatan populasi hewan dan produksi pangan hewani
- e) Diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat
- f) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya
- g) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis
- h) Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan
- i) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri
- j) Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan lindung, hutan rakyat dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan

2) Sektor Pertambangan dan Galian

Kabupaten Wonogiri memiliki potensi bahan tambang sebanyak 18 jenis. Bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi, dapat dieksploitasi dan cadangannya cukup besar sebanyak 7 jenis yaitu batu ½ permata, kalsit, kaolin, oker, batu gamping, trass dan tanah liat. Sektor ini tidak bisa menopang pendapatan daerah sepenuhnya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam daerah dan luar daerah. Kebijakan berkaitan dengan sektor ini di arahkan untuk:

- a) Peningkatan peluang usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup
 - b) Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan
 - c) Penjaminan kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen
- 3) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Transportasi darat merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Kabupaten Wonogiri. Apabila dilihat secara umum, kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, *traffict light*, dan *flash light* dalam kondisi masih bagus, meskipun secara statistik belum bisa mencukupi kebutuhan. Masalah yang perlu diperhatikan adalah masih minimnya kondisi sarana prasarana transportasi yang ada, seperti transportasi umum dan terminal yang jauh dari layak. Pengelolaan yang lebih serius, maka sektor ini akan mampu berkembang lebih baik lagi, dan diharapkan tetap menjadi sektor unggulan untuk masa yang akan datang.

Kebijakan pada sektor pengangkutan dan komunikasi dilakukan dengan:

- a) Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan
- b) Pengharmonisasian keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang
- c) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan
- d) Pelibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan melalui kemitraan dan keswadayaan
- e) Peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi terkait
- f) Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek

- g) Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu
 - h) Peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat
 - i) Peningkatan profesionalisme SDM (petugas dan pengguna di jalan), peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi
- 4) Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa mampu menyumbang PDRB Kabupaten Wonogiri sebesar 12%. Subsektor terbesar ada pada administrasi pemerintah dan pertahanan, yang disusul subsektor perorangan dan rumah tangga. Hal ini menunjukkan selain cukup banyaknya pengeluaran pemerintah daerah guna belanja pegawai dan belanja pembangunan, juga ada banyak masyarakat Kabupaten Wonogiri yang menyediakan reparasi, perbengkelan, dan jasa perorangan.

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan sektor jasa-jasa:

- a) Subsektor pemerintahan umum

Kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan umum adalah sebagai berikut:

- (1) Penetapan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah
- (2) Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar
- (3) Pemantapan penataan kelembagaan pemerintah daerah;
- (4) Penyiapan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi
- (5) Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah
- (6) Penanggulangan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk praktek KKN
- (7) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

- (8) Pemantapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah serta memberdayakan hasil-hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan publik dan kebijakan pembangunan daerah
- (9) Pemberdayaan pemerintahan Desa menuju pemantapan otonomi Desa
- (10) Peningkatan kapabilitas lembaga DPRD melalui fasilitasi peningkatan kinerja DPRD

Kebijakan subsektor pemerintahan umum juga berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan di arahkan untuk:

- (1) Pengembangan Standar Analisis Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap SKPD sebagai dasar perencanaan anggaran
- (2) Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran daerah
- (3) Penyempurnaan sistem administrasi keuangan daerah yang sederhana, fleksibel, dan akuntabel
- (4) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aparatur penggunaan anggaran daerah

b) Subsektor swasta

Kebijakan yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan jejaringnya, Pelayanan rujukan (Puskesmas Rawat Inap, RSUD) serta pelayanan kesehatan swasta
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- (3) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
- (4) Peningkatan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat masyarakat

- (5) Peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat sejak usia dini
- (6) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- (7) Peningkatan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat
- (8) Pengembangan manajemen dan kebijakan kesehatan yang mengarah selain kepada upaya preventif dan kuratif tetapi juga kepada upaya promotif

Sementara itu, kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan adalah sebagai berikut:

- (1) Pemantapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- (2) Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara dan menciptakan masyarakat belajar
- (3) Perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum terutama kejuruan
- (4) Perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal
- (5) Pengembangan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal
- (6) Peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan
- (7) Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

- (8) Peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua
- (9) Pengembangan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal
- (10) Peningkatan sarana pendidikan terutama materi dan peralatan pendidikan
- (11) Peningkatan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas pengajaran
- (12) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan
- (13) Penyempurnaan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan
- (14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan
- (15) Penataan sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
- (16) Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan

Kebijakan lain berkaitan dengan sektor jasa-jasa adalah pariwisata, adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata alam yang disinergikan dengan pengembangan wilayah dan dilakukan mempertimbangkan aspek sosial dan prinsip berkelanjutan

- (2) Pemberdayaan industri pariwisata daerah dan melibatkan pelaku pariwisata lokal, regional dan nasional dalam proses pengembangan pariwisata daerah
- (3) Pengembangan seni budaya daerah dan pelestarian wisata saujana yang memiliki daya tarik khusus sebagai sajian atraksi wisata

f. Kabupaten Sragen

Berikut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sragen tahun 2004-2008:

1) Sektor Pertanian

Luas lahan sawah yang mencapai 40% menjadikan pertanian sebagai kegiatan utama bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Lebih dari sepertiga pendapatan daerah Kabupaten Sragen diperoleh dari sektor pertanian, bahkan mengalami surplus mencapai 200.000 ton/tahun, maka tidak salah jika Sragen menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Padi organik dan tanaman buah menjadi proyek yang sedang dikembangkan oleh pemerintah setempat. Padi organik mempunyai prospek yang sangat bagus mengingat daya jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi biasa, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani. Permintaan akan beras organik pun semakin meningkat, karena semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan.

Kebijakan pada sektor pertanian pada Kabupaten Sragen dikhususkan pada revitalisasi pertanian. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

2) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Kabupaten Sragen mempunyai sumberdaya air yang cukup banyak. Hal tersebut dimanfaatkan oleh PDAM Sragen, yang kemudian di salurkan ke rumah-rumah. Tidak hanya itu, listrik sudah menyebar masuk ke desa-desa,

dan akan terus diupayakan pemberdayaannya sehingga semua masyarakat bisa menikmatinya. Namun, belum ada arah kebijakan khusus untuk meningkatkan sektor ini terutama pada subsektor air bersih dan listrik.

3) Sektor Jasa-Jasa

Subsektor pemerintahan umum menjadi penyumbang bagi pendapatan daerah yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai yang tiap tahun semakin meningkat pesat terutama aparatur pemerintah golongan II dan IV, sehingga belanja pegawai pun akan semakin meningkat. Sektor jasa-jasa mempunyai potensi yang cukup besar pada bidang pariwisata, misalnya obyek wisata Sangiran. Pengelolaan yang baik dan promosi yang tepat akan memajukan sektor ini.

Kebijakan untuk meningkatkan sektor jasa-jasa adalah sebagai berikut:

a) Subsektor pemerintahan umum

Kebijakan yang berkaitan dengan sektor ini adalah dengan diarahkan pada:

- (1) Peningkatan pemungutan PAD dengan cara yang tidak memberi beban kepada masyarakat dan pengeluaran atau belanja daerah dengan prioritas kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat
- (2) Penyusunan kondisi awal penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah secara komprehensif integral
- (3) Penataan kembali personalia aparatur daerah dan pemanfaatan sumberdaya manusia berdasarkan administrasi dan hukum yang berlaku
- (4) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan
- (5) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menutup peluang adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
- (6) Pembenahan dan pemberdayaan pemerintah desa

b) Subsektor swasta

Kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan adalah sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun
- (2) Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara
- (3) Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah
- (4) Meningkatkan perluasan pendidikan usia dini
- (5) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal
- (6) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan
- (7) Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal
- (8) Menyediakan pendidikan dan tenaga kependidikan serta menyediakan prasarana dan sarana pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
- (9) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik
- (10) Mengembangkan sistem evaluasi pendidikan
- (11) Menyempurnakan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan
- (12) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
- (13) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, transparan, dan akuntabel
- (14) Meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBD
- (15) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olah raga

Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan diarahkan kepada:

- (1) Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat
- (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

- (3) Mengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin
- (4) Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
- (5) Meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini
- (6) Meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan

Kebijakan lain yang berkaitan dengan peningkatan pariwisata melalui pengembangan budaya daerah, dengan kebijakan diarahkan kepada:

- (1) Meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata dengan cara intensifikasi
- (2) Meningkatkan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis
- (3) Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan
- (4) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam bidang promosi pariwisata

g. Kabupaten Klaten

Sektor unggulan di Kabupaten Klaten tahun 2004-2008 adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pertambangan dan Penggalian

Subsektor penggalian di Kabupaten Klaten mempunyai potensi yang cukup besar, namun belum bisa digali dan dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala, seperti masalah dana dan kualitas SDM yang ada. Akan sangat rugi, apabila potensi sebesar itu dibiarkan begitu saja, mengingat sektor ini telah menjadi sektor basis, dengan penanganan yang tepat dari pemerintah akan menambah pundi-pundi keuangan Kabupaten Klaten.

Meskipun sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis, namun sayangnya belum ada kebijakan yang cukup untuk mengembangkan sektor tersebut. Adapun kebijakan yang dilakukan

pemerintah daerah, yaitu hanya seputar pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan di arahkan untuk:

- a) Pendayagunaan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
 - b) Penanganan dampak kerusakan lingkungan hidup
 - c) Mendorong upaya pemulihan dan pelestarian fungsi ekosistem daerah aliran sungai dan kawasan lindung
 - d) Rehabilitasi kerusakan lingkungan pada kawasan budidaya melalui peningkatan kerjasama kemitraan dan mediasi penanganan permasalahan lingkungan secara terpadu
- 2) Sektor Bangunan

Kegiatan pembangunan berupa perbaikan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan. Pada tahun 2008, pembangunan jalan terus mengalami peningkatan yaitu bertambahnya jalan beraspal. Hal tersebut dirasa sangat penting, guna melancarkan arus transportasi. Pembangunan jalan dan jembatan perlu ditingkatkan lagi, terutama pada jalan-jalan poros desa dan lingkungan. Sementara itu, Kabupaten Klaten dilalui jalan Negara yang menghubungkan Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DIY. Kondisi ini akan sangat menguntungkan, selain letaknya yang strategis juga mendatangkan keuntungan ekonomis dari banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara yang bertujuan wisata ke Yogyakarta. Meskipun sektor bangunan menjadi sektor basis, namun belum ada kebijakan khusus yang dirumuskan pemerintah.

- 3) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Tingginya hasil sektor pertanian menjadikan sektor perdagangan ikut berkembang dengan cukup baik, meskipun pertumbuhannya selama periode penelitian mengalami penurunan. Hal tersebut juga di dorong oleh berkembangnya sektor industri, yaitu industri cor logam, tenun lurik, gerabah, dan meubel. Perdagangan bukan terbatas pada daerah setempat saja, melainkan sampai pada luar daerah bahkan internasional. Sektor ini telah

menyumbang kepada pendapatan daerah sebesar 27%. Kebijakan pada subsektor perdagangan di arahkan pada:

- a) Pengembangan perdagangan yang berbasis pada produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing di pasar regional dan nasional
 - b) Penguatan kelembagaan para pelaku perdagangan
 - c) Peningkatan kompetensi dan sarana prasarana pendukung
 - d) Peningkatan kerjasama dengan pihak lain diutamakan dalam mengakses pasar
- 4) Sektor Jasa-Jasa

Pergeseran perhitungan LQ yang cenderung tetap di tiga tahun awal periode penelitian, menurun di tahun 2007 (1,26), kemudian naik lagi di tahun 2008 sebesar 1,27. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana tektonik yang terjadi di tahun akhir tahun 2007 yang mengakibatkan banyak sekali bangunan-bangunan pemerintahan, rumah dinas camat yang mengalami kerusakan, tetapi tidak lama kemudian dilakukan pembangunan dan langsung bisa digunakan kembali. Apabila dilihat dari potensi yang ada, sektor jasa-jasa bisa dikembangkan lebih jauh lagi, mengingat banyaknya tempat wisata dan hiburan yang bisa ditawarkan, misalnya saja Candi Sewu, Jombor, Deles, makam-makam bersejarah, serta tradisi-tradisi masyarakat yang masih dipertahankan hingga sekarang.

Berikut merupakan arah kebijakan yang pemerintah daerah Kabupaten Klaten rumuskan dalam upaya meningkatkan sektor jasa-jasa, yaitu

- a) Subsektor Pemerintahan umum

Ada beberapa urusan pemerintahan yang mengurus subsektor pemerintahan umum, yaitu Pertama, Sekretariat Daerah, Sekretarian Dewan dan Kecamatan, dimana mengurus masalah pemerintah umum, pertanahan, pemberdayaan perempuan dan ESDM. Kebijakan diarahkan untuk:

- (1) Peningkatan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
- (2) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
- (3) Peningkatan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah
- (4) Peningkatan kegiatan dan kinerja DPRD
- (5) Peningkatan kemampuan perumusan kebijakan strategis dan peningkatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (6) Peningkatan pelayanan masyarakat
- (7) Peningkatan pengelolaan administrasi kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan

Kedua adalah Badan Kepegawaian daerah, dimana kebijakan di arahkan untuk:

- (1) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah
- (2) Pengembangan sistem pembinaan dan motivasi kerja
- (3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi kepegawaian

Kebijakan yang berkaitan dengan belanja daerah, yaitu di arahkan untuk:

- (1) Peningkatan proporsi Belanja Modal / Investasi yang menambah aset dalam struktur Belanja Langsung Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD agar dapat menggerakkan siklus perekonomian masyarakat yang akan berdampak ganda terhadap kegiatan perekonomian dan sosial lainnya
- (2) Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB), standarisasi harga barang dan jasa serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat

- (3) Peningkatan Akuntabilitas (*Accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah dengan penyusunan laporan akuntabilitas dan SIMDA oleh setiap SKPD
 - (4) Peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - (5) Penyusunan skala prioritas alokasi belanja daerah dengan penekanan pada pemihakan belanja yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara nyata dengan pendekatan kombinasi antara aspek sektoral / urusan dan kewilayahan
 - (6) Penyusunan standar kebutuhan anggaran minimal bagi SKPD
 - (7) Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal
- b) Subsektor Swasta

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pada urusan pendidikan diarahkan untuk:

- (1) Peningkatan kualitas pendidikan dan terjadinya sinergi antara pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
- (2) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
- (3) Peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme
- (4) Perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik
- (5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah
- (6) Peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan
- (7) Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan cagar budaya
- (8) Pengembangan dan pembinaan atlet berbakat
- (9) Pengembangan budaya prestasi

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (DKKS). Kebijakan pada urusan ini di arahkan untuk:

- (1) Peningkatan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
- (2) Kemitraan antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pelayanan kesehatan
- (3) Peningkatan kesehatan lingkungan dan permukiman
- (4) Peningkatan penanganan penyakit menular
- (5) Perbaikan manajemen pelayanan kesehatan
- (6) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan melalui sarana medis dan pengobatan
- (7) Penyediaan obat-obatan yang terjangkau masyarakat

Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk:

- (1) Pengembangan pengelolaan potensi pariwisata
- (2) Memperluas jaringan pelaku kepariwisataan
- (3) Membangun iklim yang kondusif untuk menarik investor bidang kepariwisataan
- (4) Pengembangan data base, sistem informasi dan komunikasi kepariwisataan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kebijakan pembangunan untuk meningkatkan sektor unggulan yang dirumuskan pemerintah secara keseluruhan sudah sesuai dengan teori teknik perencanaan pembangunan daerah, yaitu harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut (Sjafirzal, 2009: 173) :

- a. Pemasaran hasil produksi
- b. Sumber daya alam
- c. Sumber daya manusia
- d. Tingkat teknologi
- e. Akses ke sumber modal

Ada beberapa sektor yang ternyata belum optimal dalam pengelolaannya, sehingga perlu dikaji ulang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan strategis guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan melalui alat analisis *Klassen Typology* dan *Location Quotient* pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, terdapat pengelompokan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Subosukawonosraten yang dapat diklasifikasikan berdasarkan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar); daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Sukoharjo); daerah berkembang cepat (Kabupaten Sragen); dan daerah relatif tertinggal (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten).
2. Terdapat perbedaan penetapan prioritas pembangunan daerah antara pemerintah dengan yang peneliti lakukan, yaitu prioritas menurut bidang dan sektor, namun pada dasarnya menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan sektor lain dalam rangka efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah daerah di Subosukawonosraten, pada umumnya sudah sesuai dengan teori teknik perencanaan pembangunan daerah, meskipun ada beberapa sektor unggulan yang belum mendapat perhatian khusus dalam penanganannya. Berikut merupakan hasil *Location Quotient* masing-masing daerah di Subosukawonosraten tahun 2004-2008, yaitu:
 - a. Berdasarkan perhitungan analisis *Location Quotient* sektor-sektor unggulan yang dapat di andalkan dalam pembentukan PDRB di Kota Surakarta adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.
 - b. Sektor-sektor unggulan yang menjadi kegiatan ekonomi utama di Kabupaten Boyolali adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan

commit to user

galian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

- c. Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan yang menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo adalah sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- d. Hasil perhitungan LQ menunjukkan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar, yaitu sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan; dan sektor listrik, gas, dan air bersih.
- e. Berdasarkan hasil analisis LQ sektor-sektor unggulan yang menyumbang besar bagi pendapatan daerah di Kabupaten Wonogiri adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan galian; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa.
- f. Berdasarkan hasil analisis LQ, maka dapat diketahui sektor unggulan yang berperan besar dalam menyumbang pendapatan di Kabupaten Sragen adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas, dan air bersih; dan sektor jasa-jasa.
- g. Hasil analisis LQ menunjukkan adanya sektor-sektor unggulan sebagai kegiatan ekonomi utama di Kabupaten Klaten adalah sektor pertambangan dan galian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor jasa-jasa.

B. Implikasi

Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perbedaan struktur dan potensi ekonomi wilayah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung bervariasi di tiap-tiap wilayah. Adanya pengelompokan daerah berdasarkan Tipologi Klassen menurut struktur pertumbuhan dan tingkat pembangunan sangat berarti sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan:

commit to user

1. Kelompok daerah cepat maju cepat tumbuh (Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar), kebijakan pembangunan daerah sebaiknya lebih banyak diarahkan kepada sektor dan kegiatan ekonomi dan sosial yang menggunakan teknologi lebih modern dan padat modal seperti sektor industri dan jasa.
2. Kelompok daerah maju tetapi tertekan (Kabupaten Sukoharjo), kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan mencari jalan keluar dari masalah yang menyebabkan pertumbuhan daerah ini tertekan.
3. Kelompok daerah berkembang (Kabupaten Sragen), kebijakan pembangunan daerah sebaiknya diarahkan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
4. Kelompok daerah relatif tertinggal (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten), kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan teknologi padat karya.

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal potensi ekonomi yang ada pada suatu daerah. Analisis *Location Quotient* diperlukan untuk mengetahui sektor unggulan yang menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah tersebut, dengan cara ini diharapkan kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan akan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Perbedaan penetapan prioritas pembangunan antara pemerintah dan penelitian yang penulis lakukan, dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah agar melihat juga secara sektoral sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Perumusan kebijakan untuk sektor-sektor unggulan hendaknya mempertimbangkan juga aspek aspek sebagai berikut:

1. Pemasaran hasil produksi
2. Sumberdaya manusia
3. Sumberdaya alam
4. Tingkat teknologi
5. Pembentukan modal

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, penulis menyajikan beberapa saran yang diharapkan akan berguna bagi pemerintah daerah dan penelitian selanjutnya. Berikut merupakan saran-saran yang penulis ajukan:

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Saran berkaitan dengan hasil Matriks Tipologi Klassen dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Daerah cepat maju cepat tumbuh

Kebijakan pembangunan ekonomi untuk Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di arahkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya dengan pemberian fasilitas insentif fiskal, misalnya adanya keringanan pajak. Hal lain dapat dilakukan dengan pemerintah daerah memberikan dukungan permodalan, dengan adanya kemudahan kredit perbankan berupa dana penjaminan sehingga industri-industri dapat menerima kredit bank untuk membiayai usaha produktifnya.

- 2) Daerah maju tapi tertekan

Kebijakan pembangunan ekonomi untuk Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan adanya pemecahan masalah yang menyebabkan pertumbuhan daerah tersebut tertekan, misalnya dengan restrukturisasi kelembagaan petani juga peningkatan kualitas tenaga kerja, yaitu dengan diklat dan workshop. Hal lain dilakukan dengan pemberlakuan standarisasi produk-produk pertanian dan industri agar para pengusaha maupun petani mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik lagi, misal dengan didirikannya koperasi sebagai pengumpul sekaligus pengawas kualitas produk.

3) Daerah berkembang cepat

Proyek pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen agar terus dilakukan karena kesadaran masyarakat akan kesehatan yang semakin tinggi, sehingga permintaannya akan terus meningkat, misalnya dengan pemberian modal melalui lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi dan perbankan bagi para petani untuk mengembangkannya.

Sektor industri pengolahan meskipun bukan sektor basis, namun sektor ini mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar, bisa dilihat pertumbuhannya tiap tahun meningkat secara signifikan. Kebijakan diarahkan untuk memfasilitasi peralatan industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, memberikan insentif fiskal, seperti pembebasan bea masuk barang modal, bahan baku, maupun komponen yang dibutuhkan untuk industri dalam daerah.

4) Daerah relatif tertinggal

Kabupaten yang termasuk daerah relatif tertinggal seperti Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten lebih baik dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi diupayakan pada peningkatan penyediaan lapangan kerja dengan teknologi padat karya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada industri-industri kecil menengah sehingga akan banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengarahkan kegiatan pertanian yang masih menggunakan teknologi yang tradisional, namun mempunyai pasar yang cukup luas seperti tanaman pangan, misalnya hasil pertanian hasil ternak seperti susu dan daging sapi, hasil perikanan, dan tanaman pangan lainnya.

- b. Saran berkaitan dengan upaya peningkatan sektor unggulan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Pemasaran

Bagi pemerintah daerah BKAD Subosukawonosraten sebaiknya melakukan upaya peningkatan pemasaran serta mempromosikan potensi

commit to user

wilayahnya, terutama perdagangan barang dan jasa. Kendala berkaitan dengan pemasaran untuk industri-industri kecil yang ada pada kurangnya informasi pasar, untuk itu perlu adanya wadah atau lembaga yang mampu memberikan fasilitas berupa akses pertukaran informasi pasar sampai ke pelosok daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran koperasi yang bisa menampung hasil produksi dari petani sehingga selain dapat mengawasi kualitas produk juga mempermudah petani dalam memasarkan hasil pertanian mereka.

2) Sumberdaya Manusia

Meskipun pemerintah Subosukawonosraten sudah melakukan upaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, namun sayangnya hal tersebut belum mencapai kinerja yang optimal, peningkatan kinerja ini dapat dilakukan melalui diklat, workshop, lokakarya, kursus terutama baerkaitan dengan frekuensi pelatihan.

Salah satu konsep pembangunan daerah adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah yang bekerjasama untuk membangun wilayahnya. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan perguruan tinggi di wilayah Subosukawonosraten melalui penelitian dan pengabdian untuk mengarahkan strategi kebijakan dalam pembangunan daerah.

3) Sumberdaya Alam

Daerah yang memiliki sektor pertanian sebagai sektor unggulan seperti Kabupaten Sragen, Wonogiri, dan Boyolali, merupakan daerah yang mampu menghasilkan produk pertanian lebih banyak dari daerah di Subosukawonosrtaen lainnya, namun hasil produk pertanian yang berlebihan juga menyebabkan harga menjadi turun. Upaya untuk menghindari kerugian petani dapat dilakukan dengan pengolahan dan pengemasan produk pertanian lebih baik lagi, seperti nata decoco, yogurt, makanan kaleng yang mempunyai nilai jual lebih tinggi.

Khusus untuk Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten yang mempunyai sektor pertambangan dan galian

sebagai sektor basis, kebijakan di arahkan agar pengambilan barang tambang bisa lebih dioptimalkan, tetapi jangan sampai merusak lingkungan. Penegakan hukum yang tegas bagi penambang liar, selain karena berakibat merusak lingkungan juga dapat menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia, sehingga penting untuk menjaga kelestariannya. Kebijakan di arahkan agar daerah di Subosukawonosraten tetap menjaga daerah yang menjadi resapan air. Kebijakan ini khususnya ditujukan pada daerah yang mempunyai sektor listrik, gas, dan air bersih sebagai sektor unggulan seperti Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Boyolali, dan Sragen yang menandakan ketersediaan dan penggunaan air bersih di daerah tersebut lebih besar dibandingkan daerah lain di Subosukawonosraten.

4) Teknologi

Daerah Subosukawonosraten dalam melakukan kegiatan ekonominya sebaiknya sudah menggunakan teknologi yang sudah maju, guna mencapai target pembangunan ekonomi lebih efektif dan efisien. Teknologi yang dimaksud seperti teknologi dibidang pertanian, perindustrian, teknologi bidang listrik maupun teknologi informasi.

Pemerintah daerah sebaiknya mengupayakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kabupaten yang kegiatan utamanya sektor pertanian (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen), yaitu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pertanian, seperti teknologi pembenihan/pembibitan, teknologi tata guna air, teknologi peningkatan produktifitas (teknologi pemupukan dan teknologi pembasmian hama), teknologi budidaya dan produk organik, misal pengembangan padi organik yang sudah dikembangkan Kabupaten Sragen. Selain itu juga ada rekayasa peralatan seperti produk untuk penyulingan minyak astiri. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan khususnya untuk kabupaten-kabupaten yang memiliki sektor pertanian sebagai sektor unggulan.

Teknologi di bidang industri dapat dilakukan dengan penerapan teknologi penanganan limbah. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari pencemaran lingkungan, juga menghindari terganggunya kesehatan masyarakat setempat oleh limbah industri mengingat lokasi industri yang berada di dekat daerah pemukiman. Kebijakan ini khusus diarahkan bagi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo yang konsentrasi kegiatan ada pada industri pengolahan.

Berkaitan dengan promosi potensi wilayah Subosukawonosraten, terutama dalam hal perdagangan barang dan jasa, pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan ekonominya menggunakan teknologi yang sudah maju. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan internet sebagai media promosi, misalnya dengan menyediakan informasi mengenai pariwisata daerah. Pemanfaatan internet dapat dilakukan juga untuk mempermudah perijinan usaha, seperti yang sudah dilakukan Kabupaten Sragen.

5) Modal

Banyak industri yang ada di Subosukawonosraten mempunyai kendala modal yang terbatas sehingga sulit untuk berkembang. Permodalan ini dapat diatasi dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga yang mampu memberikan pelayanan berupa peminjaman modal, seperti koperasi simpan pinjam maupun perbankan yang dapat dikembangkan lagi sehingga mampu membantu usaha mikro untuk dapat mengembangkan usahanya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian ini khususnya analisis sektor unggulan, hanya menggunakan data sekunder yang sebenarnya kurang terperinci, maka besar kemungkinan hasil perhitungan yang diperoleh belum benar-benar tepat. Berdasarkan alasan tersebut, perlu adanya studi lapangan untuk penelitian lebih lanjut guna mendapatkan data primer pada sektor-sektor yang lolos perhitungan *Location Quotient*.